



HIBURAN

Ruben Onsu Kena Mental Usai Rekaman Video Call Sesama Pria Viral, Brand Ikut Diteror

Oleh Redaksi • 13 Okt, 19:59 WIB



BANDA ACEH - Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan setelah rekaman video call pribadinya viral. Ruben mengaku teman-teman dan sejumlah brand yang bekerja sama dengannya ikut menjadi sasaran serangan buzzer.

Hal itu disampaikan Ruben melalui unggahannya di media

sosial. Ia menyebut orang-orang di sekitarnya mendapat serangan meski tidak terlibat dalam masalah pribadinya.

"Pagi ini serang2 sana sini, temen2 saya dan Brand2 yg bekerja sama dgn saya atas tuduhan Keji dan sadis dari oknum yg meneng-
gahkan buzzer2 untuk mengintimidasi account2 teman2 saya, juga

Brand yg saya rasa tidak ada kaitan nya dlm permasalahan ini untuk membenci saya," tulis Ruben Onsu dikutip dari Instagram, Selasa (13/10/2026).

Ruben juga mengaku kondisi mentalnya terdampak akibat berbagai komentar negatif yang diterimanya. Ia berusaha bangkit meski hinaan tersebut sempat

membuatnya kehilangan rasa percaya diri.

"Padahal, semua itu berdampak pada kondisi mental saya. Ada kata-kata menyakitkan yang sulit saya lupakan, hingga terkadang membuat saya merasa terpuruk dan kehilangan rasa percaya diri.

Selengkapnya di halaman 16 »

NASIONAL

Dulu Sebut Gibran Cacat Konstitusi, Kini Syahganda Bilang Wapres Tak Bisa Dimakzulkan



BANDA ACEH - Sikap Syahganda Nainggolan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Sebelum diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda pernah mendesak Gibran diganti.

Kini, ia menyatakan Gibran tidak bisa dimakzulkan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi syarat pendaftaran ...

Selengkapnya di halaman 2 »

NASIONAL

Aktivis 98: Kasus Ijazah Gibran akan Munculkan Demo Besar Seluruh Indonesia



BANDA ACEH - Aktivis 98 Jayadi Santoso memprediksi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai persoalan terse-

but dapat berkembang menjadi tekanan Politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dijawab secara terbuka dan meyakinkan.

Selengkapnya di halaman 3 »

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	14
Aneka Berita	16

NASIONAL

Wakil Ketua DPD Tampung Usulan Denny Indrayana terkait Pemakzulan Gibran: Kami Takkan Diam



BANDA ACEH - Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung menegaskan komitmen DPD untuk menampung seluruh masukan yang disampaikan Denny Indrayana dan kawan-kawan. Aspirasi itu meminta DPD memprakarsai proses pemakzulan Gibran Raka-

buming usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan sang wakil presiden (wapres) memiliki ijazah setara SMA sederajat.

Selengkapnya di halaman 2 »

EKONOMI

Pilih Mana PAXG dan XAUT? Perbandingan Tokenized Gold untuk Investor 2026



BANDA ACEH - PAXG dan XAUT merupakan dua token yang memberikan eksposur terhadap emas fisik melalui teknologi blockchain. Namun, keduanya memiliki perbedaan dari sisi penerbit, penyimpanan emas, mekanisme penebusan, serta struktur produk.

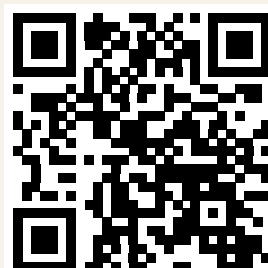
Di Indonesia, Pintu menyediakan PAXG dan XAUT sehingga kamu bisa memperoleh eksposur terhadap emas melalui aset ...

Selengkapnya di halaman 16 »

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

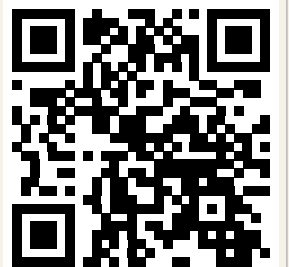
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

25 BERITA

NASIONAL

Wakil Ketua DPD Tampung Usulan Denny Indrayana terkait Pemakzulan Gibran: Kami Takkan Diam

Oleh Redaksi · 13 Okt, 19.11 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung menegaskan komitmen DPD untuk menampung seluruh masukan yang disampaikan Denny Indrayana dan kawan-kawan. Aspirasi itu meminta DPD memprakarsai proses pemakzulan Gibran Rakabuming usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan sang wakil presiden (wapres) memiliki ijazah setara SMA sederajat.

"Kami sudah mendengar tadi beberapa masukan, terutama sekali terkait usulan supaya dilakukan telatah atau kajian terhadap hal ini (pemakzulan Gibran) dan itu bisa dilakukan dalam bentuk diskusi, dalam bentuk focus group discussion yang akan melibatkan teman-teman ahli," kata Tamsil usai menerima audiensi Denny cs, Selasa (13/10/2026).

Tamsil juga menyampaikan pimpinan DPD telah berkoordinasi untuk mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan. Karena itu, dia menegaskan DPD dan tidak akan diam terhadap perkembangan aspirasi tersebut.

"Kami kira DPD selamat posisinya, tidak akan diam. Pertemuan kami pada hari ini dengan kawan-kawan semua yang mendorong upaya ini ke MK, kami terima inisiasinya bahwa DPD juga ya, saya juga tadi berkoordinasi dengan pimpinan yang lain dan Ketua DPD, mengharapkan supaya kita mencatat apa saja yang menjadi masukan dari kawan-kawan pada hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Denny mengusulkan DPD mengambil inisiatif untuk mendorong proses pemakzulan Gibran. Menurut Denny, DPD seharusnya tidak hanya menunggu apabila proses pemakzulan bergulir hingga ke MPR.

"Saya tadi sarankan bagaimana kalau DPD juga tidak hanya menunggu di ujung proses, kalau ini pemakzulan memang akan berjalan. Tetapi memulainya, menginisiasinya justru di awal begitu," kata Denny saat menyambangi rumah dinas Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).

Dia menilai DPD memiliki ruang untuk mengambil sikap lebih leluasa di tengah situasi Politik yang dinilainya berpotensi membuat partai-partai politik sungkan mengambil langkah tertentu.

Karena itu, Denny memandang DPD dapat memanfaatkan posisinya sebagai salah satu unsur parlemen untuk menindaklanjuti aspirasi publik yang berkembang setelah putusan MK.

"Yang bisa mengambil penyikap lebih leluasa sebagai sikap kamar lain dari parlemen tentu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dan aspirasi publik yang akhir-akhir munculkan pasca putusan MK tentu bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Denny menyarankan pimpinan DPD menggelar diskusi internal, mengundang elemen masyarakat sipil, hingga menyelenggarakan diskusi publik untuk membahas kemungkinan langkah yang dapat diambil.

Menurutnya, langkah tersebut masih berada dalam batas-batas etika politik dan dapat menjadi

pintu masuk bagi DPD untuk merumuskan rekomendasi, baik secara kelembagaan maupun melalui sikap masing-masing anggota.

"Saya berpikir lebih bijak, lebih baik, lebih punya makna bagi kelembagaan DPD jika kemudian DPD mengambil langkah-langkah yang inspiratif, mengambil langkah-langkah inisiatif untuk kemudian bergerak lebih awal," tuturnya.

Selain mendorong inisiatif politik, Denny mengusulkan alternatif jalur hukum apabila DPR tidak mengambil langkah untuk memulai proses pemakzulan.

Dia menilai DPD dapat mengkaji kemungkinan mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) ke MK apabila DPR dinilai tidak menjalankan inisiatifnya. Denny menjelaskan, konstitusi mengatur proses pemakzulan melalui DPR, MK, dan MPR.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Dulu Sebut Gibran Cacat Konstitusi, Kini Syahganda Bilang Wapres Tak Bisa Dimakzulkan

Oleh Redaksi · 13 Okt, 21.39 WIB



BANDA ACEH - Sikap Syahganda Nainggolan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Sebelum diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda pernah mendesak Gibran diganti.

Kini, ia menyatakan Gibran tidak bisa dimakzulkan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi syarat pendaftaran cawapres pada Pilpres 2024.

Syahganda menegaskan pemerintah sebagai bagian dari rumpun eksekutif menghormati putusan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Menurutnya, putusan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto maupun Gibran tidak bisa dimakzulkan melalui perkara tersebut.

"Kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach, ya kan. Dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden," kata Syahganda dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/10/2026).

Ia mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan dan dinamika yang muncul setelah putusan tersebut. Syahganda juga membuka kemungkinan persoalan itu berlanjut melalui jalur Politik maupun proses hukum lainnya, meski tidak menjelaskan secara terperinci mekanisme yang dimaksud.

Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ungkapnya.

Di tengah polemik tersebut, Syahganda turut menyoroti tinda-

kan seorang anggota DPRD di suatu daerah yang menurunkan foto Gibran setelah putusan MK. Ia menyayangkan tindakan itu karena Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden.

"Kalau yang turunkan foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih nggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara," ujarnya.

Pernyataan Syahganda ini berbeda dengan kritik keras yang pernah ia lontarkan sebelum menduduki jabatan di Bakom Pemerintah RI. Saat itu, ia menilai Gibran tidak layak melanjutkan posisinya sebagai wakil presiden.

"Ini wapres tidak bekerja. Bahkan untuk sekadar gunting pita dalam proyek-proyek besar saja, seorang wapres itu harus punya wibawa. Ini wapresnya tidak ada wibawa. Anda itu sudah tidak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Sudah selesai saja," kritik Syahganda dalam tayangan YouTube Refly Harun.

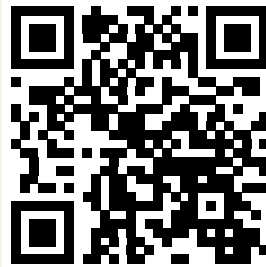
Ia bahkan menguraikan kriteria sosok wakil presiden yang menurutnya ideal untuk mendampingi Prabowo. Sosok tersebut, kata Syahganda, harus mampu mengambil alih sebagian tugas pemerintahan ketika presiden sedang menjalankan agenda lain, baik di dalam maupun luar negeri.

"Kita cari orang yang betul-betul bisa ikut bekerja. Kalau Prabowo di luar negeri, dia bisa bekerja di dalam negeri. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia urus Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut. Nah, sosok pendamping seperti ini yang seharusnya dicari di dua tahun pemerintahan ini," tambah Syahganda.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

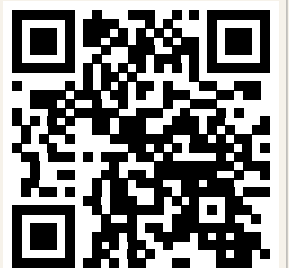
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Aktivistis 98: Kasus Ijazah Gibran akan Munculkan Demo Besar Seluruh Indonesia

Oleh Redaksi · 13 Okt, 16.48 WIB



BANDA ACEH - Aktivis 98 Jayadi Santoso memprediksi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut dapat berkembang menjadi tekanan Politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dijawab secara terbuka dan meyakinkan.

Jayadi mendesak Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menurutnya, polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran bukan hanya menyangkut persoalan pribadi, melainkan juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan integritas kepemimpinan nasional.

Ia juga menilai kontroversi yang terus berkembang tersebut berpotensi memunculkan citra buruk bagi Presiden Prabowo, terutama karena Gibran merupakan wakil presiden yang mendampingi dalam pemerintahan.

"Kasus ini bisa menjadi persoalan serius bagi pemerintahan Prabowo. Ketika polemik mengenai

wakil presiden terus menjadi perhatian publik, dampaknya tidak hanya dirasakan Gibran, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap presiden dan pemerintahannya," kata Jayadi kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Polemik ijazah Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam pemberitaan resminya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. Mahkamah juga menjelaskan bahwa sengketa hasil pemilu tidak lagi tepat digunakan untuk

mempersoalkan status Gibran setelah ia dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan MK yang secara langsung menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Hal yang ditegaskan dalam putusan adalah tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dipersoalkan, sementara permohonan tidak dapat diterima karena persoalan hukum acara.

Bagi Jayadi, polemik ini harus dijawab melalui langkah yang mampu memulihkan kepercayaan publik. Ia mendesak Gibran mempertimbangkan pengunduran diri agar persoalan tersebut tidak terus menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, pemerintah perlu memahami bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu modal penting dalam menjalankan agenda pembangunan. Apabila persoalan yang menyangkut persyaratan pejabat negara terus menjadi perdebatan, pemerintah berisiko

menghadapi tekanan politik yang semakin besar.

Di tengah polemik tersebut, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Pemberitaan Reuters pada 7 Oktober 2026 juga menyoroti putusan MK tersebut. Laporan itu menjelaskan bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dipersoalkan, tetapi tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden karena perkara yang diajukan tidak lagi sesuai dengan mekanisme sengketa hasil pemilu.

Perkembangan ini membuat persoalan ijazah Gibran tidak hanya menjadi perdebatan mengenai dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik, akuntabilitas pejabat negara, dan hubungan politik antara presiden dan wakil presiden.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Waduh! Dana Desa Dipakai Judol

Oleh Redaksi · 13 Okt, 18.58 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana desa untuk bermain judi online (judol). Praktik tersebut ditemukan pada pengelolaan anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu diungkapkan langsung Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo saat mengunjungi sekaligus melakukan monitoring Desa Antikorupsi di Kalurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangkaian acara Jelajah Media 2026, Selasa, 13 Oktober 2026.

"Kita sudah mengetahui bersama bahwa banyak sekali pihak-pihak yang telah terjatuh dalam kasus korupsi. Ada korupsi dana desa, itu ada yang APBD-nya dipergunakan untuk main judi online, coba bayangkan. Ini ada di Kaur Keuangan," kata Ibnu kepada wartawan di Bantul.

Selain penyalahgunaan anggaran untuk judol, Ibnu menyebut sejumlah modus korupsi dana desa lainnya, mulai dari perjalanan dinas fiktif, laporan pembangunan fiktif, penggelapan dana, hingga pengelembungan anggaran atau mark up.

Menurutnya, kerentanan korupsi di tingkat desa perlu menjadi perhatian serius mengingat besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah pusat melalui dana desa setiap tahunnya.

"Pada saat mempertahankan, itu banyak sekali godaan. Apalagi dana-dana yang masuk ke desa ini, itu luar biasa banyak Pak, ya. Nah, kadang-kadang orang itu tergelincir. Orang bisa tergelincir karena ada suatu kesempatan," kata Ibnu saat memberikan sambutan di Kantor Kalurahan Panggungharjo.

Ia menjelaskan, laporan fiktif dapat dilakukan dengan melaporkan pembangunan yang belum selesai seolah-olah telah rampung.

Bahkan, terdapat pula kegiatan proyek yang sama sekali tidak pernah dilaksanakan, tetapi dilaporkan seakan-akan benar-benar ada.

"Dan ini terjadi, ada di pengadilan. Kemudian penggelapan, memalsukan tanda tangan bendahara desa dalam proses pencairan digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ibnu.

Modus lainnya adalah pengelembungan harga pembelian barang untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga sebenarnya dengan nilai yang dilaporkan. Sebaliknya, penyimpangan juga dapat terjadi melalui praktik mark down dalam pelaksanaan kegiatan.

"Kemudian pengelembungan harga, pengelembungan anggaran, menaikkan harga pembelian pembelian barang yang seharusnya dibeli dengan harga 2 juta, digelembungkan menjadi 4 juta, maka dia menyadap keuntungan 2 juta. Nanti pada saat pelaksanaan bisa juga ada mark down. Itu adalah apa namanya, modus korupsi yang sering terjadi di dalam korupsi dana desa," kata Ibnu.

Ibnu menegaskan, pengelolaan dana desa harus berlandaskan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas agar anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

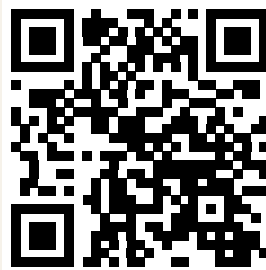
"Transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dan pertanggungjawaban itu adalah satu modal utama sehingga suatu pemerintahan itu akan bersih," pungkas Ibnu.

Kalurahan Panggungharjo merupakan desa antikorupsi pertama yang dinobatkan pada 1 Desember 2021. Kunjungan KPK kali ini sekaligus menjadi bagian dari monitoring untuk memastikan komitmen antikorupsi tetap terjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

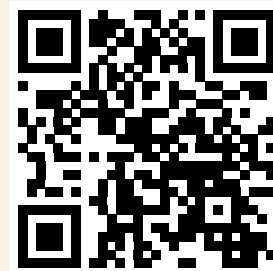
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Denny Indrayana bakal Laporkan KPU ke DKPP soal Dugaan Pasal Selundupan yang Loloskan Gibran

Oleh Redaksi · 13 Okt, 19.07 WIB



BANDA ACEH - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, berencana melaporkan dugaan pelanggaran etik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Aturan tersebut dinilai sebagai "pasal selundupan" yang turut memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilu 2024 lalu.

Denny menjelaskan, persoalan dalam kontestasi pemilu tidak hanya berhenti pada polemik administratif terkait ijazah SMA Gibran, melainkan juga masalah manipulasi regulasi yang dinilai mencederai tatanan negara hukum (rule of law).

"Jadi, teman-teman, diskusi tentang ijazah itu satu hal, itu penting, tentang bukti tamat SMA. Tapi jangan lupa bahwa yang lebih merusak itu adalah ketika negara hukum kita, rule of law, itu diobrak-abrik dengan merubah aturan dicocoklogikan dengan kandidat," kata Denny di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, proses perumusan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tersebut janggal karena tidak melalui uji publik maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, serta tertutup sepanjang fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Siapa yang sebenarnya merumuskan Pasal 18 ayat 3 itu kapan dan di mana, yang sepanjang fakta persidangan MK itu tertutup prosesnya, tidak di KPU, kapan itu draf ke berapa, tidak diuji publik,

tidak muncul, tidak di RDP dengan DPR," ujarnya.

Sebagai pihak yang menginisiasi permohonan gugatan PPHU Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan Gibran sebagai Wapres ke MK beberapa waktu lalu, Denny menyatakan dirinya akan segera mengambil langkah hukum lanjutan ke DKPP untuk menguji dugaan pelanggaran etik dalam perumusan pasal tersebut.

"Karena itu, insya Allah salah satu pilihan follow up yang akan kami lakukan, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, tunggu saja, kemungkinan besok kita akan masuk ke DKPP untuk melaporkan soal pasal selundupan ini," katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah tuduhan KPU menyelundupkan norma persyaratan pendidikan bakal calon presiden dan wakil

presiden dalam Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dia menegaskan, rumusan norma tersebut merupakan hasil masukan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga.

"Norma dalam pasal tersebut sudah melalui serangkaian proses yaitu hasil uji publik hingga hasil konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, hasil konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat kerja RDP, dan hasil harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum. Secara prosedural semua tahapan proses pembentukan PKPU telah ditempuh," ujar Hasyim dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (12/10/2026)

NASIONAL

Bukan Cuma Ijazah, Ada Tiga Hambatan Besar bagi Gibran di 2029

Oleh Redaksi · 13 Okt, 21.54 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik Adi Prayitno menilai terdapat tiga hambatan besar yang dapat menghalangi langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika ingin kembali maju pada Pilpres 2029.

Hambatan pertama, menurut Adi, berkaitan dengan persoalan ijazah menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat.

Hambatan kedua adalah minimnya dukungan Politik dari partai-partai yang memiliki kursi di DPR RI.

Sementara itu, faktor elektabilitas juga dinilai menjadi hambatan berikutnya yang membuat partai politik belum mempertimbangkan Gibran sebagai kandidat yang akan diusung pada Pilpres 2029.

"Tentu di luar bagaimana bargain politik Gibran itu tidak memiliki dukungan politik yang ada di parlemen. Dari segi elektabilitas juga tidak terlampau mentereng-mentereng amat adalah variabel-variabel kunci yang kemudian menjelaskan kenapa partai politik tidak memberikan dukungan ke Gibran untuk maju yang kedua kalinya," ujar Adi dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, dikutip Selasa (13/10).

Menurut Adi, kondisi tersebut membuat jalan Gibran menuju Pilpres 2029 tidak mudah. Ia bahkan menilai Presiden ke-7 Joko Widodo ((Jokowi) mulai menyadari bahwa upaya mendo-

rong Gibran kembali maju akan menghadapi banyak hambatan.

"Termasuk juga soal bagaimana secara perlahan Jokowi itu seperti sudah mulai berpikir realistis memaksakan Gibran maju untuk yang kedua kalinya di 2029, salah satunya dengan Pak Prabowo Subianto jalanan yang ditempuh itu harus cukup berliku dan cukup mendaki dan sangatlah rumit seromit-rumitnya," tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima. Majelis beralasan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan Selasa (6/10/2026) malam.

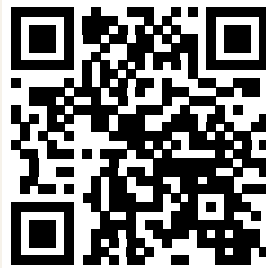
Dalam pertimbangan putusan, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA.

"Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat," kata Arsul.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

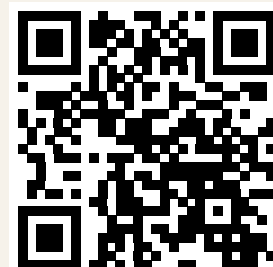
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Heboh! Gerakan Turunkan Foto Gibran di Semua Instansi Mulai Disuarakan

Oleh Redaksi · 13 Okt, 13.55 WIB



BANDA ACEH - Polemik ijazah Gibran memanaskan usai putusan MK! Kini, seruan turunkan foto sang wapres di semua instansi mencuat dan memantik sorotan publik.

Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik reaksi di media sosial.

Kini, muncul seruan bertajuk “Turunkan Foto Wapres Gibran di Semua Instansi” yang mengundang perhatian publik.

Ajakan tersebut salah satunya disuarakan oleh pemilik akun X, Abi Jamaluddin melalui akun @PutraMataSatu.

Seruan itu mengarah pada gerakan untuk menurunkan foto Gibran yang terpasang di berbagai instansi.

Namun, seberapa besar gerakan ini bakal meluas? Hingga informasi yang dihimpun dalam pemberitaan tersebut, belum ada data terverifikasi mengenai jumlah pendukung, instansi yang menindaklanjuti ajakan, maupun

kemungkinan terbentuknya gerakan secara terorganisasi.

Seruan tersebut muncul setelah MK membacakan putusan terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026.

Perkara ini menjadi sorotan karena menyangkut dokumen pendidikan yang dipersoalkan oleh para pemohon.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan dalam dokumen yang terungkap di persidangan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyeteraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, putusan tersebut tidak serta-merta menggugurkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

MK juga tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya melalui perkara tersebut.

Permohonan yang diajukan sejumlah pihak itu dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki

kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara.

MK turut menjelaskan bahwa persoalan pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden secara substantif merupakan ranah lembaga yang berwenang

Putusan inilah yang kemudian memicu perdebatan di ruang publik.

Sebagian pihak menyoroti persoalan dokumen pendidikan yang dibahas dalam persidangan, sementara aspek hukum terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden tetap menjadi persoalan tersendiri.

Di tengah perdebatan tersebut, seruan menurunkan foto Gibran di semua instansi menjadi salah satu bentuk ekspresi ketidakpuasan yang muncul di media sosial.

Ajakan itu memperlihatkan bagaimana polemik hukum dapat berkembang menjadi perbincangan Politik yang lebih luas.

Meski begitu, seruan di media sosial tidak otomatis menunjukkan adanya gerakan nasional.

Belum ada informasi terverifikasi yang memastikan bahwa instansi pemerintah maupun lembaga lainnya telah menjalankan ajakan tersebut.

Perkembangan selanjutnya masih bergantung pada respons masyarakat dan sikap pihak-pihak yang terkait.

Belum dapat dipastikan apakah seruan itu akan berhenti sebagai perbincangan di dunia maya atau berkembang menjadi aksi yang lebih luas.

Polemik ini pun kembali menempatkan persoalan persyaratan pendidikan pejabat publik dalam sorotan.

Di sisi lain, penting untuk membedakan antara temuan dalam pertimbangan hukum, amar putusan pengadilan, dan berbagai reaksi politik yang muncul setelahnya.

Publik kini menunggu bagaimana perdebatan tersebut berkembang, termasuk apakah seruan menurunkan foto Gibran akan mendapat dukungan lebih luas atau justru mereda seiring waktu

NASIONAL

Profesor dari Singapura Prediksi Jokowi Bakal Bersikap Keras pada Prabowo

Oleh Redaksi · 13 Okt, 21.45 WIB



BANDA ACEH - Persaingan Politik antara Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi berkembang menjadi pertentangan terbuka.

Sosiolog sekaligus Associate Professor di School of Social Sciences, Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., memprediksi Jokowi akan mengambil sikap konfrontatif terhadap kepemimpinan Prabowo.

Prediksi itu disampaikan Sulfikar saat menjadi narasumber dalam sinar di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Selasa, 13 Oktober 2026. Ia menilai hubungan politik kedua tokoh tersebut telah retak dan memasuki fase perseteruan yang sulit dihindari.

"Akan ada suatu masa di mana Jokowi akan menyerang Prabowo secara terbuka," ungkap Sulfikar.

Ia memperkirakan kritik Jokowi nantinya dapat menyasar kinerja pemerintahan Prabowo, termasuk program-program andalannya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, disebut dalam uraian sebagai salah satu kebijakan yang berpotensi menjadi sasaran kritik terkait realisme pelaksanaan dan penggunaan anggaran.

Menurut Sulfikar, potensi konflik tersebut berakar pada perebutan dominasi politik. Prabowo secara formal memegang kekua-

saan sebagai presiden, sementara Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh dan sumber daya politik yang besar.

Persaingan dua pusat pengaruh itu, menurut dia, menciptakan dinamika politik yang semakin memanas. Salah satu gejalanya terlihat dari perombakan kabinet atau reshuffle yang dinilai Sulfikar sebagai instrumen politik Prabowo untuk merespons tekanan dari kubu Jokowi.

Gestur Prabowo dan Jokowi dalam peringatan HUT TNI pada 5 Oktober lalu juga menjadi sorotan. Prabowo terlihat melewati Jokowi tanpa bersalaman, yang dalam uraian tersebut ditafsirkan sebagai sinyal ketidaknyamanan di antara keduanya.

Di tengah dinamika itu, Sulfikar mengingatkan masyarakat sipil dan kalangan intelektual agar tetap kritis. Ia menilai perhatian publik yang terus terpusat pada perseteruan kedua tokoh dapat mengesampingkan persoalan lain yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, dan lingkungan.

Karena itu, ia mendorong munculnya wacana politik baru yang tidak terus-menerus berpusat pada Jokowi dan Prabowo. Menurut Sulfikar, ruang politik perlu memberi tempat bagi gagasan dan alternatif kepemimpinan di luar persaingan kedua tokoh tersebut.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

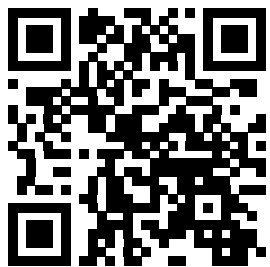
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Polemik Syarat Pendidikan Gibran Merembet ke DKPP, KPU dan Bawaslu Diadukan

Oleh Redaksi · 13 Okt, 08.33 WIB



BANDA ACEH — Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 merembet ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dua aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah diterima DKPP dan menyeret pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedua aduan tersebut berkaitan dengan persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Aduan diterima DKPP pada Kamis (8/10/2026) dan Jumat (9/10/2026).

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan kedua laporan itu akan terlebih dahulu menjalani verifikasi administrasi sebelum diputuskan apakah dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Aduan pertama disampaikan Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan

Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026.

Laporan tersebut tercatat dengan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026. Pihak yang diadukan adalah Ketua dan lima anggota KPU RI.

"Aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026 yang kami berikan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026. Pihak yang diadukan dalam aduan ini adalah Ketua dan lima Anggota KPU RI," kata Raka Sandi dalam keterangannya.

Aduan kedua diajukan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan. Laporan itu tercatat dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.

Berbeda dengan laporan pertama, aduan kedua menyeret total 11 penyelenggara pemilu, terdiri atas enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Bawaslu RI. Para pengadu juga telah memberikan

kuasa kepada sejumlah advokat untuk menangani laporan tersebut.

Dengan demikian, kedua aduan menyorot unsur penyelenggara pemilu di KPU, sedangkan laporan kedua turut mencakup pimpinan Bawaslu.

Raka Sandi menegaskan DKPP menghormati hak masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Namun, setiap laporan tetap harus melewati tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dua aduan tersebut akan segera diproses dalam verifikasi administrasi. Jika hasilnya memenuhi syarat, akan kami lanjutkan ke tahap verifikasi materiel," ujarnya.

Verifikasi administrasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan pengaduan. Sementara itu, verifikasi materiel bertujuan menilai alat bukti serta relevansinya dengan pokok aduan guna menentukan apakah laporan layak dilanjutkan ke persidangan.

Jika dinyatakan memenuhi syarat administrasi, aduan akan

mendapatkan nomor registrasi dan masuk ke tahap verifikasi materiel. Sebaliknya, laporan yang berstatus belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) akan diberitahukan secara tertulis kepada pengadu paling lambat lima hari kerja setelah proses verifikasi.

Khusus laporan berstatus BMS, pengadu diberi kesempatan melengkapi atau memperbaiki dokumen dalam waktu maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Jika tidak diperbaiki dalam tenggat tersebut, aduan dinyatakan gugur.

Ketentuan itu mengacu pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

Raka Sandi mengatakan DKPP memahami tingginya perhatian masyarakat terhadap laporan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Dokter Tifa: Anies Terima Tawaran Jadi Menteri Jika Benar-Benar Ada

Oleh Redaksi · 13 Okt, 13.59 WIB



BANDA ACEH — Aktivis Demokrasi, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menyampaikan pandangan agar Anies Baswedan menerima tawaran menjadi menteri apabila Presiden Prabowo Subianto benar-benar menawarkannya. Ia sependapat dengan gagasan yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan.

Di mana Syahganda bahkan menyebut posisi Menteri Pendidikan sebagai salah satu pilihan yang cocok bagi Anies. Namun, sampai saat ini, wacana tersebut belum berarti sudah ada tawaran resmi dari Prabowo.

"Saya sependapat dengan gagasan Syahganda Nainggolan yang menyarankan Anies Baswedan menerima tawaran menjadi menteri apabila Presiden Prabowo Subianto benar-benar menawarkannya," kata Dokter Tifa di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia mengemukakan ada pelajaran penting dari sejarah Politik Indonesia. Prabowo Subianto pernah menjadi rival politik Jokowi, tetapi akhirnya bersedia masuk ke dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo tidak harus menjadi presiden terlebih dahulu untuk ikut bekerja bagi negara.

"Mengapa Anies tidak bisa mengambil pelajaran serupa?," ujarnya.

Menurutnya, Pilpres 2024 sudah berlalu dan Anies kalah dalam kontestasi tersebut. Ia memahami seorang tokoh politik tentu memiliki cita-cita dan agenda besar untuk bangsanya, tetapi pengabdian kepada bangsa tidak semestinya berhenti hanya karena seseorang belum berhasil menjadi presiden.

Sudah lebih dari dua tahun sejak Pilpres Februari 2024, dan Dokter Tifa mengaku menunggu kiprah Anies, menunggu gagasan besar

yang diwujudkan menjadi gerakan nyata, serta menunggu gebrakan yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat luas.

Dengan nama besar, pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta, latar belakang akademik, dan modal kepercayaan publik yang dimilikinya, Anies semestinya dapat terus berkarya melalui berbagai jalan.

"Jangan sampai energi politik habis untuk menunggu momentum Pilpres berikutnya," tegasnya.

Apabila kesempatan menjadi menteri benar-benar datang, lanjutnya, hal itu sebaiknya dimanfaatkan untuk membenahi satu sektor penting dalam kehidupan bangsa. Pendidikan, misalnya, merupakan fondasi masa depan Indonesia yang menyimpan begitu banyak persoalan membutuhkan pemikiran, keberanian, dan kerja nyata.

Ia menambahkan, menerima jabatan bukan berarti harus kehilangan sikap kritis. Bergabung ke pemerintahan tidak berarti harus membenarkan semua kebijakan. Justru seorang tokoh yang memiliki gagasan berbeda dapat memberikan perspektif baru dari dalam pemerintahan, sepanjang tetap berpegang pada integritas dan prinsipnya.

"Jika akhirnya tidak ada tawaran menjadi menteri, Anies tetap mempunyai ruang luas untuk berkarya: membangun pusat pemikiran, mengembangkan gagasan pendidikan, menggerakkan masyarakat, membina generasi muda, dan menawarkan solusi konkret bagi persoalan bangsa," ujar Dokter Tifa.

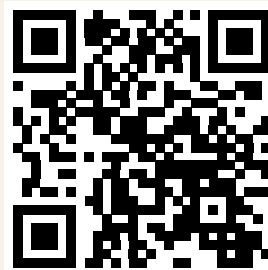
Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar nama besar yang terus dipelihara, melainkan pemikiran yang diwujudkan menjadi tindakan.

"Anies, bangsa ini tidak bisa terus menunggu," pungkasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Buat yang Sedang Umrah, Simak Imbauan Pemerintah soal Situasi Arab Saudi

Oleh Redaksi · 13 Okt, 10.57 WIB



BANDA ACEH – Pemerintah Indonesia mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Imbauan ini juga ditujukan kepada jemaah umrah yang masih berada di Tanah Suci maupun mereka yang tengah mempersiapkan keberangkatan.

Pemerintah meminta WNI tetap tenang, mengutamakan keselamatan, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari otoritas setempat maupun perwakilan Indonesia di Arab Saudi.

Imbauan tersebut disampaikan di tengah laporan serangan rudal yang dilancarkan kelompok Houthi dari Yaman. Serangan dilaporkan menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada Sabtu (10/10) dan berlanjut pada Minggu (11/10) waktu setempat.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ichsan Marsha, meminta WNI tidak

panik, tetapi tetap memperhatikan perkembangan situasi keamanan.

“Kami mengimbau WNI di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Hindari lokasi rawan, patuhi aturan yang berlaku, serta ikuti arahan otoritas setempat. Keselamatan harus menjadi prioritas,” ujar Ichsan Marsha di Jakarta, seperti dikutip pada Senin (12/10).

Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah meminta WNI menghindari lokasi yang berpotensi rawan dan membatasi aktivitas yang tidak mendesak, terutama di wilayah yang terdampak situasi keamanan.

WNI Diminta Pantau Informasi Resmi

Selain mengutamakan keselamatan, WNI di Arab Saudi juga diminta berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial maupun saluran komunikasi lainnya.

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai kabar yang belum

terverifikasi, apalagi menyebarkannya jika berpotensi menimbulkan keresahan.

WNI diimbau terus memantau informasi dan arahan resmi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta Kementerian Luar Negeri.

Kepatuhan terhadap aturan dan arahan otoritas setempat juga menjadi hal penting untuk menjaga keselamatan selama berada di Arab Saudi.

Jemaah Umrah Diminta Koordinasi dengan Travel

Perhatian khusus diberikan kepada jemaah umrah yang masih berada di Arab Saudi maupun mereka yang belum berangkat dari Indonesia.

Jemaah yang sedang berada di Tanah Suci diminta terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), terutama untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi perjalanan dan kemungkinan perubahan jadwal.

NASIONAL

Berikut 10 Menteri Berkinerja Terburuk, Bahlil Nomor Satu

Oleh Redaksi · 13 Okt, 17.00 WIB



Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Survei Arawicaksa Institute mencatat 10 menteri mendapat penilaian terburuk dari publik selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dari 10 Menteri yang mendapat penilaian terburuk, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menempati posisi terendah dalam skor penilaian sebesar rata-rata 1,2.

Sejumlah nama menteri lain yang mendapat penilaian buruk adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (1,3), Menteri HAM Natalius Pigai (1,5), Menteri Perumahan Maruarar Sirait (1,6), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid (1,8).

“Naiknya harga BBM non-subsidi seperti Pertamina mendorong terjadi migrasi konsumen ke Peralite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU,” kata Rudi kata peneliti senior Arawicaksa Institute Rudi Hartono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2026.

Sementara itu isu-isu terkait Koperasi Desa (Kopdes) membuat penilaian publik terhadap Mendes Yandri juga berada di papan bawah.

“Berbagai kabar miring terhadap pelaksanaan program Kopdes perlu mendapat perhatian, supaya target mendorong ekosistem perekonomian desa bisa berjalan lebih baik dan mendapat penerimaan publik,” kata Rudi.

Sementara itu sorotan publik juga terarah pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berkaitan dengan skandal suap yang menyeret sejumlah petinggi kementerian, politisi, dan pengusaha properti terkemuka.

“Selain itu nama Nusron juga disebut-sebut dalam kasus korupsi kuota haji yang saat ini masih dalam persidangan,” kata Rudi.

Menteri dan pejabat lain yang masuk dalam penilaian terburuk adalah Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana (2,0), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (2,1), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (2,2), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (2,2), dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (2,3).

Rudi berharap evaluasi terhadap kinerja dan penilaian para pembantunya di jajaran Kabinet Merah-Putih berlangsung secara objektif, demi keberhasilan program-program ke depan dengan tetap memperhitungkan dukungan kekuatan-kekuatan Politik yang ada.

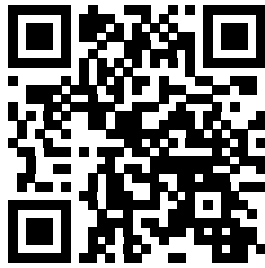
Survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3-8 Oktober 2026 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bahlil dan Raja Juli Masuk Daftar Menteri Berkinerja Terburuk Versi Celios

Oleh Redaksi · 13 Okt, 10.45 WIB



BANDA ACEH - Nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mendapat sorotan dalam survei evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya masuk dalam jajaran pejabat kabinet yang memperoleh skor negatif dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Kabinet Bayangan.

Dalam survei yang dipaparkan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira secara daring, Minggu (11/10/2026), Bahlil memperoleh skor -159. Sementara itu, Raja Juli mendapat skor -103. Di antara keduanya, Menteri HAM Natalius Pigai juga mencatat skor negatif, yakni -158.

Bhima mengatakan, sejumlah nama yang mendapat penilaian buruk kembali muncul dalam evaluasi tahun ini. Ia turut mengaitkan penilaian terhadap Raja Juli dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Untuk menteri yang terburuk nomor satu, ini sepertinya masih sama seperti tahun lalu, ada Bahlil, Pigai, kemudian Raja Juli Antoni, ini sepertinya terkait dengan masalah karhutla," ujar Bhima.

Selain Bahlil, Pigai, dan Raja Juli, tujuh pejabat kabinet lain juga memperoleh skor negatif. Mereka adalah Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dengan skor -47, Menko Pangan Zulkifli Hasan -43, serta Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid -24.

Berikutnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pra-

tikno serta Menteri Sosial Saiful-lah Yusuf masing-masing mendapat skor -17. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon sama-sama memperoleh skor -16.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh skor 291. Namun, Bhima menegaskan penilaian itu dilakukan sebelum perombakan di Kementerian Keuangan.

Setelah Purbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendapat skor 140, disusul Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan skor 127 serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin dengan skor 12.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman memperoleh skor

11, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 8, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait 6, dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra 6. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat skor 5 dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 4.

Survei Celios dan Kabinet Bayangan melibatkan 1.271 responden, terdiri atas 129 responden ahli dan 1.142 masyarakat umum. Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat umum menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads, sedangkan responden ahli dijangar dengan metode snowball sampling

NASIONAL

Hore! Pemerintah Akan Bagikan HP Gratis demi Salurkan Bansos

Oleh Redaksi · 13 Okt, 20.02 WIB



BANDA ACEH - Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan adanya rencana pemerintah untuk membagikan handphone (HP) atau telepon seluler secara gratis kepada masyarakat. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mendukung digitalisasi layanan keuangan di Indonesia.

Kebijakan pembagian HP ini berkaitan erat dengan target pemerintah untuk memperluas akses perbankan secara nasional, sekaligus merombak mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran dan efisien.

Dalam paparannya pada acara Prasasti Policy yang digelar di Ballroom Ritz-Carlton, Hashim menyoroti tingkat inklusi keuangan di Indonesia yang masih memiliki celah. Ia menyebutkan bahwa saat ini sekitar 30 persen penduduk Indonesia masih berstatus *unbanked* alias belum memiliki rekening bank.

Kondisi tersebut, menurut Hashim, menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan keuangan serta mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari berbagai sektor.

Pemberian HP gratis kepada masyarakat dirancang agar setiap warga dapat mengakses rekening digital secara mandiri. Ke depannya, skema penyaluran bansos yang selama ini sering dilakukan dalam bentuk fisik atau uang tunai, akan sepenuhnya dialihkan ke dalam sistem digital.

"Setiap warga negara akan diberi handphone yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing," tegas Hashim.

Dengan adanya digitalisasi bansos melalui ponsel pintar ini, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan minim potensi pemotongan liar di lapangan.

NASIONAL

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Oleh Redaksi · 13 Okt, 19.03 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terhadap temuan survei Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama tim Kabinet Bayangan yang menunjukkan sebanyak 75 persen responden dari kelompok masyarakat umum merasa stres menghadapi kebijakan pemerintah.

Selain itu, sekitar 67 persen responden menyatakan stres terhadap perilaku Prabowo.

"Saya menghargai setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan lembaga independen," kata Gibran lewat keterangan resminya, Selasa, 13 Oktober 2026.

Putra sulung mantan Presiden RI Joko Widodo itu menuturkan, baginya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri.

"Kritik yang disampaikan kepada pemerintah, termasuk

kepada saya, harus dijawab dengan kerja yang lebih baik," ungkapnya.

Gibran berjanji, akan menindaklanjuti temuan tersebut lewat evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat.

"Dan menjawab permasalahan masyarakat di lapangan," tutupnya.

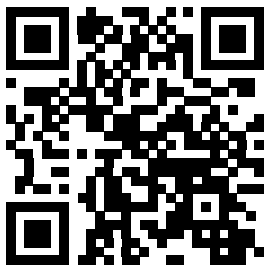
Survei tersebut menjangar persepsi 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli di berbagai provinsi di Indonesia. Hasil survei mencatat penilaian kinerja Prabowo secara keseluruhan hanya mendapat skor 4,6 dari skala 10 menurut masyarakat umum, serta 2,8 dari skala 10 berdasarkan penilaian para ahli.

Sementara itu, kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberi nilai 4,9 oleh masyarakat umum dan 2,2 oleh kelompok ahli.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Sempat Tertahan, KIPP-AKSI Akhirnya Serahkan Surat Angket Gibran ke Fraksi PKB

Oleh Redaksi · 13 Okt, 13.43 WIB



BANDA ACEH -Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) untuk Angket Gibran akhirnya menyerahkan surat desakan penggunaan Hak Angket kepada Fraksi PKB DPR RI, setelah sempat mengalami kendala.

Perwakilan KIPP dan AKSI, Ray Rangkuti, mengatakan surat tersebut berisi permintaan agar PKB mengambil inisiatif mendorong hak angket untuk mengusut polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Oleh karena itulah sama-sama hari ini kita bertekad mendorong Fraksi PKB untuk mengambil inisiatif melakukan hak angket,” kata

Ray di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurut Ray, hak angket diperlukan untuk mengklarifikasi polemik mengenai ijazah Gibran yang terus menjadi perdebatan publik. DPR dinilai dapat memfasilitasi pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Ray juga meminta PKB mendorong seleksi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, dan jujur, menyusul berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Karena kita ingin sama-sama setop kebohongan!” tegas Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia ini.

Menghadapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB,

Muhammad Khozin, mengatakan pihaknya menerima surat dan aspirasi KIPP-AKSI untuk dibahas lebih lanjut.

Namun, audiensi lanjutan akan dijadwalkan kembali karena DPR tengah memasuki masa reses, sehingga agenda anggota dewan dipusatkan di daerah pemilihan masing-masing.

“Jadi setelah pertemuan ini, kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi, dan seterusnya,” ujar Khozin.

Sebelumnya, mereka yang dijadwalkan beraudiensi dengan Fraksi PKB DPR RI, tertahan di pintu masuk Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan,

Jakarta, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Pantauan RMOL di lokasi, Perwakilan KIPP, Ray Rangkuti, Lucius Karus, bersama perwakilan AKSI, Ubedilah Badrun, Effendi Ghazali, Mahasiswa dan sejumlah masyarakat sipil lainnya tidak diperbolehkan masuk oleh Pamdal DPR RI di area Visitor Management Sistem.

Setelah menunggu sejam lebih, masyarakat sipil dan mahasiswa ini pun mulai gerah lantaran masih belum diperbolehkan masuk menemui Fraksi PKB yang sudah dijadwalkan. Akhirnya, sempat terjadi adu mulu antara masyarakat sipil dan pihak Kesejkenan DPR.

NASIONAL

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Oleh Redaksi · 13 Okt, 14.13 WIB



BANDA ACEH -Langkah Presiden Prabowo Subianto merombak menteri yang terafiliasi dengan kekuatan lama yakni mantan Presiden Joko Widodo atau kelompok Politik Solo dinilai tepat sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan menuju arah politik ke depan.

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, perombakan kabinet atau reshuffle tidak semata-mata didasarkan pada evaluasi kinerja menteri, hubungan personal, maupun power sharing. Lebih dari itu, reshuffle juga berkaitan dengan arah dan peta kekuatan politik yang ingin dibangun Prabowo.

“Reshufflke bukan hanya like or dislike atau berbasis power sharing, tetapi reshuffle berbasis intensitas arah ke peta politik di masa depan,” kata Pangi di Kanal Youtube Bambang Widjojanto, Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurutnya, selama dua tahun pemerintahan berjalan, Prabowo telah memberikan kesempatan kepada para pembantunya untuk menunjukkan kapasitas dan loyalitas politik masing-masing.

Kesempatan menduduki jabatan strategis di pemerintahan, kata Pangi, sekaligus menjadi ruang bagi Prabowo untuk mengamati perilaku politik para menteri, termasuk mereka yang diduga diam-diam membangun kekuatan sendiri.

“Dia menaruh orang di situ kelihatan aslinya mana yang diam-diam membangun kekuatan poli-

tik, dia pasti cermati. Dia tahu ketika dikasih panggung dia ngapain,” ujarnya.

Pangi menilai, dua tahun merupakan waktu yang cukup bagi Prabowo untuk membaca dinamika dan kecenderungan politik orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahannya.

Ia mengaku sejak awal telah mengingatkan Prabowo agar tidak terus memberikan ruang kepada kelompok politik Solo yang dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya.

“Dari awal saya sudah ingatkan, berhentilah mengasuh geng Solo karena sangat berbahaya,” tegasnya.

Menurut Pangi, Prabowo semestinya sejak awal membatasi peluang bagi kelompok yang berasal dari kekuasaan sebelumnya untuk melakukan konsolidasi politik di dalam pemerintahan.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai prosedur menggergaji, yakni mencegah sisa-sisa kekuatan politik lama memanfaatkan posisi di pemerintahan untuk membangun kekuatan baru yang berpotensi mengancam konsolidasi politik Prabowo.

“Saya menyarankan juga dari jauh hari mestinya prosedur menggergaji, artinya jangan memberi kesempatan sisa kekuasaan lama untuk melakukan konsolidasi politik untuk membangun kekuatan baru karena itu membahayakan kekuatan ini,” pungkasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

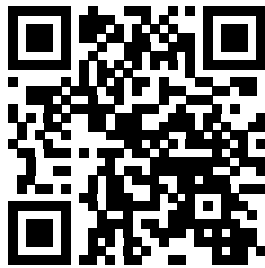
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Parpol Dukung Prabowo di 2029 Tapi Tidak dengan Gibran

Oleh Redaksi · 13 Okt, 14.17 WIB



BANDA ACEH -Meski sejumlah partai telah menyatakan komitmen kembali mendukung Prabowo Subianto di 2029, namun dukungan untuk Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden belum terlihat.

Gibran sepertinya tidak masuk radar partai Politik untuk kembali diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, dalam kontestasi Pilpres, dukungan partai politik menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan oleh siapa pun yang ingin maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

“Kalau bicara kandidasi di Pilpres, suka tidak suka, wajib hukumnya siapa pun harus dekat

dan mendapatkan tiket dari partai,” kata Adi, Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurutnya, posisi Gibran sebagai wakil presiden saat ini tidak serta-merta menjamin dirinya kembali mendapatkan tiket pencalonan pada Pilpres 2029. Terlebih, sejumlah partai politik telah menyatakan komitmen untuk kembali bersama Prabowo, tetapi belum menunjukkan arah dukungan yang sama terhadap Gibran.

Adi menambahkan, apabila aturan pencalonan presiden dan wakil presiden nantinya mengharuskan dukungan minimal dua fraksi, peran elite partai akan semakin menentukan. Mereka menjadi pihak yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan

siapa yang dapat maju dalam kontestasi mendatang.

“Maka hanya elite partai yang kemudian menjadi veto player dan menjadi faktor determinan yang bisa ikut bertanding di 2029,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dukungan partai politik bukan hanya dibutuhkan untuk memperoleh tiket pencalonan, melainkan juga untuk menopang kekuasaan setelah kandidat terpilih. Dukungan politik di parlemen menjadi penting ketika seorang pemimpin menghadapi kritik maupun persoalan politik.

Dalam konteks Gibran, Adi menyoroti berbagai kritik dan olok-olok yang diarahkan kepada wakil presiden tersebut, termasuk polemik keabsahan ijazah yang

dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, situasi tersebut memperlihatkan pentingnya dukungan politik, terutama dari partai-partai yang memiliki kekuatan di parlemen. Namun, ia melihat belum banyak pihak yang secara terbuka tampil membela Gibran di tengah berbagai kritik yang menerpanya.

“Hari ini ada bully-an, nyaris tidak ada yang membela. Seakan-akan Gibran berjalan di tempat yang sunyi dan tidak ada yang pasang badan memberikan dukungan,” pungkasnya.

NASIONAL

Minta MUI Fokus Sertifikasi Halal Ketimbang Urus Konser, Sahroni Kena Semprot

Oleh Redaksi · 13 Okt, 10.52 WIB



BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni tiba-tiba menyentil Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sahroni meminta organisasi tersebut untuk fokus pada kerja-kerja yang memang menjadi tugas MUI.

Hal itu disampaikan Sahroni lewat unggahannya di akun media sosial resminya, yakni Instagram @ahmadsahroni88, Senin (12/10/2026).

Belum diketahui secara pasti alasan dari postingan tersebut. Namun, ia meminta MUI untuk tidak mengurus konser.

“MUI fokus pada kerja sertifikasi halal yah, jangan urusin konser-konser. Banyak tugas di internal MUI yang perlu dikerjakan,” tulis Sahroni.

Sahroni menyarankan MUI untuk fokus pada kerjaannya sendiri yang lebih penting dan membutuhkan penanganan khusus.

“Fokus pada kerja-kerja yang memang butuh kekhususan. Contoh sertifikat halal jangan sampai ada masalah. Itu lebih penting,” ujarnya.

Diketahui, MUI belakangan ini menyatakan penolakannya terhadap konser penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan digelar di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan Jakarta pada 3 November 2026.

Desakan tersebut muncul setelah pemerintah membatalkan rencana konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel and New Breed di Indonesia.

Penolakan dilakukan karena konser tersebut melibatkan figur yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap Israel.

“Konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dikutip dari situs resmi MUI.

Respons MUI Menohok

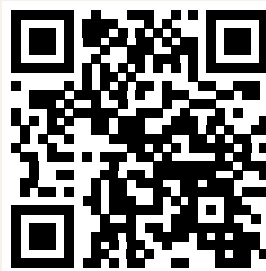
Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Muhammad Cholil Nafis memberikan respons menohok terhadap statemen politisi Partai NasDem tersebut. Ia menegaskan bahwa MUI adalah lembaga yang berisi para tokoh ormas Islam di Indonesia yang memiliki konsekuensi pada kemaslahatan bangsa dan negara.

“Sahroni ini anggota Dewan ya? Ya... dikira MUI itu lembaga pemerintah aja. itu kumpulan ormas-ormas yang mencintai negeri ini dengan amar ma’ruf nahi munkar,” tulis Kiai Cholil Nafis

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Heboh Penemuan Bayi dalam Tas di Palmerah, Polisi Amankan Ibu Berusia 17 Tahun

Oleh Redaksi · 13 Okt, 08.30 WIB



Heboh penemuan bayi laki-laki dalam tas hitam di depan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Polisi pun mengamankan remaja perempuan berinisial DN (17). FOTO/Net.

BANDA ACEH - Heboh penemuan bayi laki-laki dalam tas hitam di depan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Polisi pun mengamankan remaja perempuan berinisial DN (17) setelah menelusuri CCTV.

Kapolsek Palmerah AKP Parman BM Nainggolan mengatakan bayi tersebut ditemukan warga pada Kamis (8/10/2026). Saat itu, seorang warga mendengar tangisan bayi dari depan RPTRA di Jalan Kemanggisan Batu Sari, Gang Maya, RT 02 RW 13, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

“Saat itu, seorang warga bernama Muhammad Saepudin yang tengah beristirahat di sekitar lokasi mendengar suara tangisan

bayi,” kata AKP Parman BM Nainggolan, Selasa (13/10/2026).

Muhammad Saepudin kemudian mencari sumber suara tersebut bersama warga lainnya, Deni Hermawan. Keduanya mendapati tangisan itu berasal dari sebuah tas hitam yang tergeletak di depan RPTRA.

Mereka kemudian meminta bantuan Hairudin untuk membuka tas tersebut. Saat dibuka, tas itu ternyata berisi seorang bayi laki-laki.

Hairudin segera membawa bayi tersebut ke bidan terdekat untuk mendapatkan pertolongan awal. Pengurus RT setempat juga dihubungi untuk membantu penanganan lebih lanjut.

Polisi kemudian menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hasil penyelidikan mengarah ke sebuah tempat kos di

Jalan Rawa Belong Raya, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.

“Dari hasil penelusuran CCTV dan pengumpulan keterangan, polisi memperoleh petunjuk yang mengarah ke sebuah tempat kos di kawasan Jalan Rawa Belong Raya, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat,” ujarnya.

Setelah berkoordinasi dengan pengurus tempat kos, petugas mengidentifikasi DN (17), seorang perempuan yang diduga berkaitan dengan penemuan bayi tersebut.

“Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, DN mengaku melahirkan seorang diri di kamar kosnya,” ungkapnya.

Setelah melahirkan, DN membungkus bayinya menggunakan kain sebelum memasukkannya ke dalam kantong hitam. Dia kemudian membawa tas berisi bayi tersebut dengan berjalan kaki

menuju depan RPTRA, lalu kembali ke tempat kosnya.

“Petugas selanjutnya membawa perempuan tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui motifnya,” jelas dia.

Dalam penanganan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian yang diduga digunakan saat persalinan dan dokumen hasil pemeriksaan medis dari RSUD Tarakan.

Penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana meninggalkan atau membuang anak dalam kasus tersebut. Dugaan pelanggaran itu mengacu pada Pasal 430 dan/atau Pasal 429 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

NASIONAL

Luhut Bela Syahganda: Pejabat Malaysia Jangan Baper

Oleh Redaksi · 13 Okt, 13.45 WIB



BANDA ACEH -Praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Luhut Parlinggoman Siahaan meminta pejabat Malaysia tidak berlebihan menyikapi pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan terkait kabut asap lintas batas.

“Jangan baper. Kalau ada yang perlu diluruskan, sampaikan melalui komunikasi yang baik. Persoalan lingkungan seperti kabut asap tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyudutkan,” kata Luhut di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurut Luhut, perbedaan pandangan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya disikapi secara proporsional dan tidak berkembang menjadi polemik Politik yang kontraproduktif.

Indonesia memang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hutan dan lingkungan. Namun, persoalan kabut asap juga perlu dibahas secara objektif dengan mengedepankan kepentingan bersama.

Luhut menambahkan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan langkah serius, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Faktor

cuaca dan iklim dapat memperburuk kebakaran, tetapi tidak menghilangkan pentingnya upaya pencegahan.

Ia pun meminta pihak-pihak yang keberatan dengan pernyataan Syahganda menempuh jalur komunikasi dan diplomasi.

“Kalau ada perbedaan pandangan, mari dibahas melalui jalur diplomasi. Indonesia dan Malaysia sama-sama berkepentingan menjaga hubungan baik,” pungkasnya.

Syahganda sebelumnya menyebutkan karhutla terjadi bukan sepenuhnya akibat kesalahan manusia, namun ada fenomena alam yang turut terjadi.

“Jadi kita juga minta kepada semua (negara) tetangga untuk mengerti, ini adalah di luar beyond human eror. Ini benar-benar alam,” kata Syahganda, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Sontak pernyataan Syahganda turut memantik respons pejabat Malaysia. Salah satunya disampaikan Pemimpin Pengimbang Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor Andrew Chen Kah Eng.

“Rakyat Malaysia menderita akibat pencemaran ini, tetapi pejabat Anda justru seolah mempermainkan kesehatan kami,” kata Andrew.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

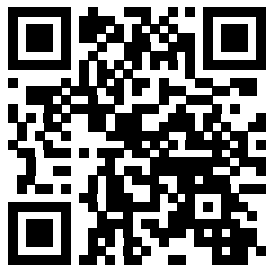
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK, Minta Tak Ada Keistimewaan Calon

Oleh Redaksi · 13 Okt, 11.00 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan pengujian syarat pendidikan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Permohonan dengan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 itu diajukan oleh Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Jomenta Surbakti.

Para pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan minimal bagi capres dan cawapres. Ketentuan tersebut menyebutkan, "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah

atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat".

Selain norma pasal tersebut, para pemohon juga menguji penjelasan Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang menguraikan kategori sekolah lain yang sederajat dengan sekolah menengah atas (SMA).

Penjelasan itu berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'sekolah lain yang sederajat', antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari. Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam argumentasi permohonannya, para pemohon menilai keberadaan frasa "atau sekolah lain yang sederajat" berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Mereka menilai ketentuan tersebut dapat memberikan keistimewaan kepada pasangan calon tertentu untuk memenuhi persyaratan pencalonan hanya dengan menggunakan surat keterangan.

"Berlakunya frasa 'atau sekolah lain yang sederajat' dalam Pasal 169 yang memberikan keistimewaan atau privilege kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk bisa mendaftar hanya dengan surat keterangan yang dimana telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, padahal dalam konteks negara hukum yang demokratis keterbukaan publik

menjadi ciri pemerintahan demokrasi," bunyi permohonan pemohon sebagaimana dikutip dalam laman MKRI, Selasa (13/10).

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK memberikan penegasan konstitusional mengenai ketentuan kesederajatan pendidikan dengan SMA.

Pemohon menginginkan penetapan kesetaraan tersebut dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Menyatakan norma frasa 'kesederajatan pendidikan dengan sekolah menengah atas ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'," imbu pemohon

NASIONAL

Polisi Gerebek MP Club Pekanbaru, Puluhan Orang yang Diamankan Positif Narkoba

Oleh Redaksi · 13 Okt, 13.34 WIB



BANDA ACEH -Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau gencar memerangi peredaran narkoba dengan menggerebek tempat hiburan malam MP Club di Kota Pekanbaru, Minggu dini hari, 11 Oktober 2026.

Dalam operasi gabungan tersebut, sebanyak 68 orang diamankan. Bahkan pasca operasi tersebut, petugas memasang police line di area pub dan salah satu ruangan MP Club pada Senin, 12 Oktober 2026.

"Pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan selama kurang lebih satu bulan terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika," kata Dirresnarkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira dalam keterangan resmi.

Dari 68 orang yang diamankan, terdapat pengunjung, waitress, petugas keamanan atau security, serta asisten manajer.

Usai diamankan, seluruhnya menjalani pemeriksaan urine. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang

disampaikan petugas, dari 47 laki-laki, sebanyak 42 orang dinyatakan positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.

Sedangkan, dari 21 perempuan, seluruhnya dinyatakan positif mengandung amphetamine maupun methamphetamine.

"Dalam penggerebekan itu, petugas turut menyita barang bukti berupa 7,5 butir pil ekstasi, ganja seberat 1,6 gram, serta uang tunai sebesar Rp14,3 juta yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika," jelas Kombes Putu.

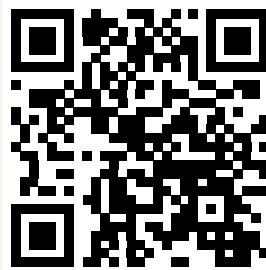
Kini, delapan orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing. Kemudian, 60 orang lainnya telah diserahkan untuk menjalani asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau.

Proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan untuk memastikan peran masing-masing pihak serta mengungkap kemungkinan jaringan pemasok di atasnya," terangnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

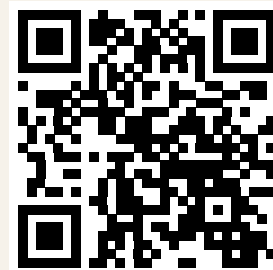
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Oleh Redaksi · 13 Okt, 08.45 WIB



BANDA ACEH -Pernyataan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, yang membantah dugaan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pil-pres 2024, tidak pernah dibahas dan diselundupkan, direspons serius direspons serius Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Doli menilai Hasyim sedang berupaya mengalihkan persoalan dengan melibatkan pihak lain. Politikus Golkar itu bahkan melontarkan kritik keras terhadap mantan Ketua KPU itu.

"Jadi Hasyim ini sekarang sedang berupaya berbagi dosa," tegas Doli kepada wartawan di

Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Legislator Golkar itu pun mempertanyakan pihak-pihak yang menurutnya turut diseret dalam persoalan tersebut.

"Nah, saya tanya udah sampai sama siapa saja dia bagi dosanya itu, ya kan? Jangan dibawa-bawa keluar. Kan dia institusinya itu di KPU. Jadi jangan bawa-bawa institusi lain, dan kemudian menarik-narik kita gitu," katanya.

Doli menegaskan, dirinya semula tidak ingin terlibat langsung dalam polemik tersebut. Ia mengaku memilih menyiapkan data tanpa mengungkapkannya ke publik.

Namun, setelah namanya disebut secara pribadi, Doli merasa perlu memberikan penjelasan dan membuka data yang dimilikinya melalui forum resmi DPR.

"Cuman karena ini sudah nyebut nama saya pribadi, ya saya harus jelaskan. Kalau memang mau dibuka, ya kita buka. Gitu, ya," tegasnya.

Selain menyinggung polemik aturan pemilu, Doli turut mempertanyakan posisi Hasyim Asy'ari usai tak lagi menjadi Ketua KPU RI.

Adapun saat ini Hasyim Asy'ari menjabat sebagai Komisaris Independen di PTPN I.

Doli mempertanyakan latar belakang dan proses yang mem-

buat Hasyim memperoleh jabatan tersebut, khususnya karena menurut penilaiannya, Hasyim tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan bidang perkebunan.

"Saya tanya, dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN. Coba tanya sama dia, itu dia tuh dapat dari mana komisaris itu? Hadiah dari siapa?" ketusnya.

"Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya yang berkaitan dengan soal perkebunan. Dia harus jelaskan itu. Kok bisa dia dapat posisi jadi komisaris itu, ya kan?" imbuh Doli.

NASIONAL

PKS Siap Jembatani Aspirasi Publik soal Ijazah Gibran ke DPR

Oleh Redaksi · 13 Okt, 10.29 WIB



BANDA ACEH -Polemik Ijazah Gibran Rakabuming yang berkembang di tengah masyarakat dinilai perlu ditempuh melalui jalur hukum dan konstitusional. DPR RI juga didorong mengkaji serta menindaklanjuti temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan kewenangannya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alimuzzamir Yusuf (AMY) saat menerima audiensi aliansi masyarakat sipil yang di antaranya dihadiri Ray Rangkuti, Effendi Ghazali, Ubaidillah Badrun, serta perwakilan advokat dan organisasi mahasiswa di Kantor DPTP PKS, Jakarta.

"PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang ingin agar putusan MK ditindaklanjuti secara hukum dan konstitusional. Jadi, permintaan itu memang sesuatu yang wajar dalam iklim demo-

krasi," ujar AMY, dikutip Selasa, 13 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, sebagai partai Politik yang memiliki perwakilan di DPR RI, PKS akan menjembatani aspirasi tersebut melalui Fraksi PKS untuk dikaji lebih lanjut.

"DPR perlu mengkaji dan menindaklanjuti temuan MK sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan membawa aspirasi masyarakat ke DPR RI melalui Fraksi PKS untuk dikaji di komisi terkait (komisi II dan komisi X)," jelasnya.

AMY berharap polemik Ijazah Gate dapat menjadi pembelajaran bagi kehidupan demokrasi Indonesia agar penyelenggaraan Pemilu lebih baik.

"Mari kita ambil pelajaran dari polemik dan kegaduhan ijazah gate ini agar proses dan penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik," pungkasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

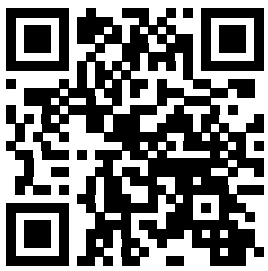
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Pj Sekda Aceh Minta Percepatan Rehabilitasi Terminal Aceh Tamiang, Fasilitas Pelayanan Ditingkatkan

Oleh Redaksi · 13 Okt, 21.47 WIB



BANDA ACEH, ACEH TAMIANG – Pemerintah Aceh mendorong percepatan penyelesaian rehabilitasi Terminal Tipe B Aceh Tamiang agar fasilitas transportasi yang rusak akibat banjir pada akhir tahun lalu tersebut segera kembali beroperasi secara normal. Selain memulihkan kerusakan, rehabilitasi pada tahun anggaran 2026 ini juga mencakup peningkatan fasilitas untuk mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, saat meninjau progres rehabilitasi terminal, Selasa (13/10). Dalam kunjungan tersebut, Taufik didampingi Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, Plh. Inspektur Aceh, T. Aznal Zahri, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Taufik mengatakan, Terminal Tipe B Aceh Tamiang memiliki peran strategis bagi masyarakat karena menjadi salah satu simpul transportasi antarkota dalam provinsi sekaligus pintu masuk Aceh dari Sumatera Utara.

“Terminal ini sangat vital bagi masyarakat. Kami mengharapkan percepatan penyelesaian pembangunan agar pemanfaatannya dapat segera pulih,” ujar Taufik.

Ia menilai progres rehabilitasi menunjukkan peningkatan. Ia pun berharap pihak rekanan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan agar penyelesaian sesuai target dan terminal tidak terlalu lama menunggu untuk kembali melayani masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan rehabilitasi Terminal Tipe B Aceh Tamiang merupakan bagian dari upaya pemerintah memulihkan fasilitas transportasi yang terdama-

pak bencana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Faisal, rehabilitasi pada tahun anggaran 2026 ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kerusakan, tetapi juga mencakup peningkatan sejumlah fasilitas untuk menunjang kenyamanan dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa angkutan.

“Sejumlah fasilitas ditingkatkan, di antaranya jumlah loket dari 8 menjadi 12 unit dan luas ruang tunggu dari 40 menjadi 168 meter persegi. Fasilitas kantin juga bertambah dari 2 menjadi 4 unit, sedangkan fasilitas toilet pria dan wanita meningkat dari 2 menjadi 6 unit,” ujar Faisal.

Selain itu, rehabilitasi mencakup penataan kantor petugas agar lebih terintegrasi, penyediaan akses bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, serta fasilitas ATM. Pembrehan juga dilakukan pada musala dan pagar terminal, disertai pem-

baruan tampilan bangunan agar lebih modern.

Faisal berharap peningkatan fasilitas tersebut tidak hanya mendukung kelancaran operasional terminal, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

“Kami berharap rehabilitasi ini dapat diselesaikan sesuai target sehingga terminal segera kembali melayani masyarakat dengan fasilitas yang lebih baik, aman, dan nyaman,” ujar T. Faisal.

Dengan percepatan penyelesaian rehabilitasi dan peningkatan fasilitas tersebut, Terminal Tipe B Aceh Tamiang diharapkan kembali berfungsi optimal sebagai simpul transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antara Aceh dan Sumatera Utara.[]

ACEH

Gubernur Mualem Lantik Taufik sebagai Pj Sekda Aceh, Masa Tugas Maksimal Tiga Bulan

Oleh Redaksi · 13 Okt, 11.46 WIB



BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melantik Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Taufik, ST, M.Si., sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Selasa, 13 Oktober 2026.

Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda Aceh sekaligus memastikan koordinasi administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan.

Pengangkatan Taufik sebagai Pj Sekda Aceh tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg. 821.22/112/2026 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh. Dalam keputusan itu, Taufik yang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) ditugaskan merangkap jabatan sebagai Pj Sekda Aceh.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) saat menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh kepada Taufik, ST, M.Si. FOTO/HO-ISTIMEWA

Masa penugasan tersebut berlaku paling lama tiga bulan, dihitung sejak keputusan mulai berlaku sesuai ketentuan yang ditetapkan. Taufik mulai menjalankan tugas sebagai Pj Sekda Aceh sejak tanggal pelantikan.

Penunjukan ini dilakukan menyusul kekosongan jabatan Sekda Aceh setelah pemberhen-

tian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/TPA Tahun 2026 tertanggal 21 Agustus 2026 dan mutasi ke jabatan lain melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/96/2026 tertanggal 24 Agustus 2026.

Dalam proses penunjukan tersebut, Pemerintah Aceh juga memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/7708/SJ tertanggal 24 September 2026.

Keputusan gubernur itu mengamanatkan pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dengan saksama dan penuh tanggung jawab.

Sekda memiliki peran penting dalam mengoordinasikan administrasi pemerintahan serta membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

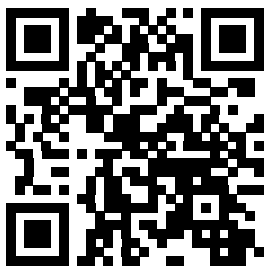
Dengan penunjukan Pj Sekda, fungsi koordinasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh diharapkan tetap berjalan selama jabatan Sekda belum terisi secara definitif.

Keputusan tersebut ditetapkan di Banda Aceh pada September 2026. Salinannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Inspektur Aceh, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.***

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Mualem Tinjau Pemulihan Pascabencana di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan Pertanian hingga Pendidikan

Oleh Redaksi · 13 Okt, 18.57 WIB



BANDA ACEH, ACEH TAMIANG – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, meninjau sejumlah sektor pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Kunjungan tersebut mencakup penyaluran bantuan kebencanaan, peninjauan pembangunan fasilitas air bersih dan hunian tetap (huntap), dukungan bagi sektor pertanian, hingga peningkatan sarana pendidikan.

Dalam agenda pertama, Mualem bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyaksikan penyerahan bantuan buffer stock penanggulangan bencana dari Pemerintah Aceh. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana.

Pada kesempatan itu, masyarakat yang hadir turut menyampaikan doa agar Gubernur Aceh

senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas untuk masyarakat Aceh.

Selanjutnya, Mualem meninjau progres pembangunan fasilitas air bersih di kawasan hunian tetap yang mendapat bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Ia berharap pembangunan fasilitas air bersih beserta hunian tetap tersebut dapat segera diselesaikan agar masyarakat terdampak bencana bisa menempati hunian yang layak dan memperoleh akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perhatian terhadap pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam kunjungan tersebut. Mualem menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa satu unit traktor crawler kepada Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Buket Mata Ie, Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu, diserahkan pula bantuan pupuk Nitrea sebanyak dua

ton dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Bantuan ini diharapkan mampu menunjang aktivitas pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, serta membantu para petani bangkit kembali setelah terdampak bencana.

Di sektor pendidikan, Mualem turut meninjau kondisi SMK Negeri 2 Karang Baru sekaligus melihat kesiapan bantuan perangkat komputer dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh. Perangkat tersebut telah siap digunakan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Mualem berharap fasilitas pendidikan yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga mendukung proses pembelajaran serta peningkatan kualitas pendidikan bagi para siswa.

Rangkaian kunjungan ini menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Aceh terhadap percepatan

pemulihan Kabupaten Aceh Tamiang. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan hunian dan air bersih, pemulihan sektor pertanian, serta penguatan sarana pendidikan.

Pemulihan pascabencana bukan hanya tentang membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, menggerakkan roda perekonomian, dan memperoleh akses terhadap pelayanan dasar secara berkelanjutan.

Pemerintah Aceh terus mendorong agar berbagai upaya pemulihan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga Aceh Tamiang dapat bangkit dan kembali tumbuh setelah menghadapi bencana.[]

ACEH

Mualem Minta Pj Sekda Aceh Perkuat Koordinasi dan Kinerja Birokrasi

Oleh Redaksi · 13 Okt, 14.22 WIB



BANDA ACEH, MEDAN – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), meminta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, S.T., M.Si., memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan meningkatkan kinerja birokrasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik.

Harapan tersebut disampaikan Mualem saat melantik Taufik sebagai Pj Sekda Aceh dalam prosesi pelantikan di Medan, Selasa (13/10/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.812.22/112/2026 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh.

Mualem menegaskan, jabatan Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif.

“Saya berharap Penjabat Sekda Aceh dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, membangun koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran pemerintah, serta memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebu-

tuhan masyarakat Aceh,” ujar Mualem.

Ia juga berharap Taufik dapat memperkuat sinergi antarsatuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dan mitra kerja Pemerintah Aceh. Selain itu, Taufik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Mualem berharap penguatan koordinasi internal Pemerintah Aceh dapat mendorong peningkatan kinerja birokrasi sekaligus memastikan agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara berkelanjutan.

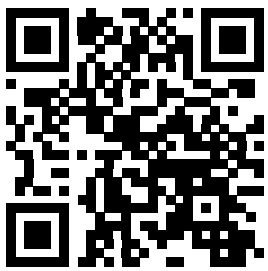
Turut hadir dalam pelantikan tersebut mantan Sekda Aceh, Taqwallah; Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Aceh, Kombes Pol. Said Anna Fauza, S.I.K., M.M., M.H.; Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Dr. A. Murthala, M.Si.; serta para kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Taufik turut didampingi istrinya, Ny. Fitriani Taufik, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

10 BERITA

HIBURAN

Ruben Onsu Kena Mental Usai Rekaman Video Call Sesama Pria Viral, Brand Ikut Diteror

Oleh Redaksi · 13 Okt, 19.59 WIB



BANDA ACEH - Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan setelah rekaman video call pribadinya viral. Ruben mengaku teman-teman dan sejumlah brand yang bekerja sama dengannya ikut menjadi sasaran serangan buzzer.

Hal itu disampaikan Ruben melalui unggahannya di media sosial. Ia menyebut orang-orang di sekitarnya mendapat serangan meski tidak terlibat dalam masalah pribadinya.

"Pagi ini serang2 sana sini, temen2 saya dan Brand2 yg bekerjasama dgn saya atas tuduhan Keji dan sadis dari oknum yg mengekstraksi buzzer2 untuk mengintimidasi account2 teman2 saya, juga Brand yg saya rasa tidak ada kaitan nya dlm permasalahan ini untuk membenci saya," tulis Ruben Onsu dikutip dari Instagram, Selasa (13/10/2026).

Ruben juga mengaku kondisi mentalnya terdampak akibat berbagai komentar negatif yang diterimanya. Ia berusaha bangkit

meski hinaan tersebut sempat membuatnya kehilangan rasa percaya diri.

"Padahal, semua itu berdampak pada kondisi mental saya. Ada kata-kata menyakitkan yang sulit saya lupakan, hingga terkadang membuat saya merasa terpuruk dan kehilangan rasa percaya diri. Namun, saya terus berusaha menguatkan diri, melawan pikiran-pikiran yang terus mengingatkan saya pada ucapan tersebut, dan memaksa diri untuk tetap semangat menjalani hari-hari saya," curhatnya.

Di tengah konflik tersebut, Ruben menegaskan bahwa langkahnya membawa persoalan ke pengadilan bukan untuk menantang siapa pun. Ia mengaku hanya ingin memperjuangkan haknya sebagai ayah agar bisa bertemu anak-anaknya.

"Mengajukan persoalan ini ke pengadilan bukan berarti saya ingin menantang siapa pun. Saya hanya ingin memperjuangkan hak saya sebagai orang tua kandung

untuk dapat bertemu dengan anak saya tanpa syarat yang tidak semestinya. Lalu, mengapa begitu banyak informasi tentang saya yang dibentuk dan disebar dengan berbagai versi?" tegas Ruben.

Ruben juga menyayangkan teman-teman dan mitra bisnisnya ikut menerima komentar negatif. Menurutnya, mereka tidak seharusnya terkena dampak dari persoalan rumah tangganya.

"Bukan hanya kepada saya, tetapi juga kepada teman-teman dan brand-brand yang bekerja sama dengan saya. Mereka menerima komentar-komentar yang menyudutkan, bahkan cacian yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Padahal, mereka tidak seharusnya ikut menanggung dampak dari persoalan pribadi yang sedang saya hadapi," lanjutnya.

Ruben menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang konflik karena kebencian. Ia berharap persoalan tersebut bisa dise-

lesaikan dengan baik, terutama demi kepentingan anak-anaknya.

"Saya memilih untuk tetap berjuang, bukan untuk memenangkan kebencian, melainkan untuk memperjuangkan hak saya dan mencari penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak, terutama bagi anak saya," tutup Ruben Onsu.

Diketahui, sebelumnya Ruben Onsu melaporkan akun Instagram Sarwendah atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan akses ilegal. Laporan tersebut terdaftar di Polda Metro Jaya pada 11 Oktober 2026.

Laporan itu menambah daftar panjang perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah. Hingga kini, gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di sisi lain, Sarwendah juga menggugat Ruben terkait dugaan wanprestasi. Perkara tersebut masih berada pada tahap awal persidangan di Pengadilan Negeri ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

EKONOMI

Pilih Mana PAXG dan XAUT? Perbandingan Tokenized Gold untuk Investor 2026

Oleh Redaksi · 13 Okt, 18.45 WIB



Ilustrasi PAXG vs XAUT: Perbandingan tokenized gold untuk Investor 2026. FOTO/AI for HAL.

BANDA ACEH - PAXG dan XAUT merupakan dua token yang memberikan eksposur terhadap emas fisik melalui teknologi blockchain. Namun, keduanya memiliki perbedaan dari sisi penerbit, penyimpanan emas, mekanisme penebusan, serta struktur produk.

Di Indonesia, Pintu menyediakan PAXG dan XAUT sehingga kamu bisa memperoleh eksposur terhadap emas melalui aset digital. Selain itu, aplikasi ini menyediakan pilihan tokenized silver sebagai bagian dari produk komoditas tertokenisasi.

Sebelum membandingkan PAXG dan XAUT, investor dapat melihat harga emas hari ini di Banda Aceh sebagai salah satu referensi untuk memahami pergerakan emas fisik. Namun, harga emas fisik di suatu wilayah tidak selalu sama dengan harga tokenized gold karena keduanya menggunakan mekanisme perdagangan yang berbeda.

Selain itu, investor perlu membedakan tokenized gold dari jenis perhiasan emas lainnya. Informasi harga emas putih 1 gram hari ini tidak dapat menjadi acuan langsung untuk menentukan nilai PAXG atau XAUT.

Apa Itu PAXG?

PAXG atau Pax Gold merupakan tokenized gold yang diterbitkan Paxos Trust Company. Paxos menjelaskan bahwa setiap PAXG mewakili satu fine troy ounce emas London Good Delivery yang disimpan dalam vault terakreditasi LBMA di London.

Melalui struktur tersebut, PAXG menggabungkan eksposur terhadap emas fisik dengan fleksibilitas aset blockchain. Investor dapat memiliki pecahan PAXG sehingga tidak harus membeli satu batangan emas secara penuh.

PAXG juga memiliki mekanisme penebusan sesuai persyaratan yang ditetapkan Paxos. Namun, investor perlu memahami bahwa penebusan emas fisik memiliki ketentuan tertentu sehingga kepemilikan token tidak berarti investor dapat menukar

token dengan emas fisik tanpa memenuhi persyaratan.

Apa Itu XAUT?

XAUT atau Tether Gold merupakan tokenized gold yang diterbitkan oleh Tether Gold. Setiap XAUT merepresentasikan satu fine troy ounce emas fisik yang disimpan dalam vault di Swiss.

Tether menjelaskan bahwa XAUT memberikan kepemilikan terhadap emas fisik yang menjadi underlying. Investor kemudian dapat menggunakan token tersebut dalam ekosistem blockchain sesuai jaringan dan platform yang mendukungnya.

XAUT juga dapat dibagi menjadi pecahan yang sangat kecil. Dengan demikian, investor tidak perlu membeli satu unit penuh untuk memperoleh eksposur terhadap emas. Mekanisme tersebut memberikan fleksibilitas bagi investor yang ingin mengalokasikan dana dalam jumlah tertentu.

Perbedaan PAXG dan XAUT

Perbedaan utama PAXG dan XAUT terletak pada penerbitnya. Paxos menerbitkan PAXG, sedangkan Tether Gold menerbitkan XAUT. Karena itu, investor perlu memahami struktur perusahaan, mekanisme cadangan, serta ketentuan masing-masing penerbit.

Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penyimpanan emas. PAXG menggunakan emas yang disimpan di vault terakreditasi LBMA di London, sedangkan XAUT menyimpan emas fisiknya di Swiss.

Selain lokasi penyimpanan, mekanisme penebusan juga memiliki ketentuan berbeda. Paxos menyediakan mekanisme penebusan PAXG sesuai persyaratan yang berlaku, sedangkan XAUT memiliki mekanisme penebusan yang ditentukan oleh Tether Gold.

PAXG vs XAUT dari Sisi Harga

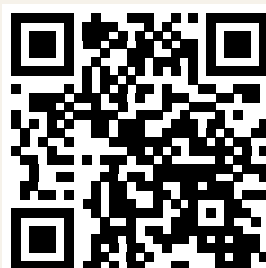
PAXG dan XAUT sama-sama mengikuti harga emas sehingga keduanya dapat bergerak searah ketika harga emas global mengalami perubahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

Jepang Pulang, Klaim Indonesia Bisa Tangani Karhutla Sendiri Bikin Netizen Protes

Oleh Redaksi · 13 Okt, 14.09 WIB



BANDA ACEH - Rilis resmi Kementerian Pertahanan Jepang soal penghentian misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia ramai disorot warganet. Mereka mempertanyakan pernyataan bahwa Indonesia bisa menangani karhutla sendiri, sementara kebakaran dan kabut asap masih berdampak hingga ke negara tetangga.

Sorotan warganet merujuk pada siaran pers Kementerian Pertahanan Jepang tertanggal 29 September 2026 di website Kementerian Pertahanan Jepang. Dalam dokumen tersebut, pemerintah Indonesia disebut menyampaikan bahwa penanganan karhutla selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri.

"The Government of Indonesia informed Japan that the firefighting operations conducted by the Japan Self-Defense Forces had contributed to preventing the spread of the forest fires and that further response efforts could be handled by the Government of Indonesia," tulis Kementerian Pertahanan Jepang dalam poin ketiga rilisnya.

Pernyataan itu berarti Indonesia disebut mengakui kontribusi operasi Jepang dalam mencegah meluasnya kebakaran. Namun, dokumen tersebut tidak menyebut seluruh titik api telah padam atau ancaman karhutla sudah berakhir.

Dalam poin keempat, Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan telah memerintahkan pengakhiran operasi bantuan darurat internasional di Indonesia. Pasukan Jepang dijadwalkan kembali ke negaranya setelah menyelesaikan operasi pemadaman yang direncanakan dan persiapan kepulangan.

Tangkapan layar rilis Kementerian Pertahanan Jepang yang menyebut pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan problem karhutla.

Pernyataan tersebut lantas memicu polemik di media sosial. Sejumlah warganet menilai pemerintah terlalu pongah karena disebut menyatakan mampu menangani karhutla sendiri, sementara hingga kini belum ada penjelasan resmi yang memadai mengenai dasar penilaian tersebut. Di sisi

lain, warga di sejumlah wilayah Kalimantan masih menghadapi kabut asap yang mengganggu pernapasan. Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan pernyataan bahwa penanganan karhutla selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri.

BNPB Apresiasi Bantuan Jepang Terpisah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengapresiasi dukungan Pasukan Bela Diri Jepang atau Self-Defense Forces (SDF) dalam membantu pemadaman karhutla di wilayah Kalimantan. Dalam siaran pers pada 30 September, BNPB juga menyampaikan bahwa bantuan Jepang telah membantu mencegah meluasnya kebakaran.

BNPB mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi yang menyebut Indonesia mampu melanjutkan pengendalian dan penanganan karhutla. Namun, siaran pers tersebut tidak merinci indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan penanganan secara mandiri.

Selama bertugas, tiga helikopter CH-47 Chinook milik Jepang melakukan sekitar 40 operasi

udara dengan menjatuhkan lebih dari 220 ton air. Operasi pengeboman air atau water bombing tersebut berlangsung sejak 16 September di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Pontianak dan Ketapang.

Helikopter dan personel Jepang tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 10 September setelah bertolak dari Pelabuhan Kure, Prefektur Hiroshima, pada 30 Agustus. BNPB menyebut pengerahan tersebut menjadi kali pertama militer Jepang menjalankan operasi pemadaman karhutla dalam misi luar negeri.

Bantuan itu merupakan bagian dari kerja sama Kementerian Pertahanan kedua negara dalam operasi kemanusiaan dan bidang pertahanan lainnya. Jepang kemudian mengakhiri dukungan pemadaman pada 29 September setelah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia.

Malaysia Belum Terima Respons

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

HIBURAN

Pria Berinisial Y Tegaskan VC dengan Ruben Onsu Adalah Asli

Oleh Redaksi · 13 Okt, 19.56 WIB



GELORA.CO - Pria berinisial Y akhirnya buka suara mengenai rekaman panggilan video yang viral di media sosial, yang menunjukkan interaksinya dengan Ruben Onsu. Dalam sebuah pernyataan bersama rekannya, Artos, Y menegaskan bahwa video yang beredar adalah asli dan bukan hasil dari teknologi kecerdasan buatan. Dia juga menjelaskan bagaimana pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah acara ulang tahun.

Y menjelaskan bahwa momen perkenalan dengan Ruben Onsu terjadi ketika dia dan Artos tengah menjalani tugas sebagai pemandu acara. "Ya betul, video itu asli dan tanpa rekayasa apa pun. Jadi, awal pertama kali saya ketemu dengan beliau, RO itu, di acara ulang tahunnya sahabatnya RO," ungkap Y seperti yang dikutip dari YouTube Cunicumi.

Dalam kesempatan itu, Y menggambarkan bagaimana dia tiba-tiba disapa oleh Ruben Onsu untuk duduk bersamanya dan ngobrol. "Jadi saya dan partner saya ini lagi MC, lalu saya duduk di sana, terus si RO ngajak duduk bareng, ngobrol-ngobrol, kenalan," tambahanya.

Setelah perkenalan singkat tersebut, asisten Ruben Onsu menghampiri Y untuk meminta nomor teleponnya. Y mengaku bahwa asisten tersebut beralasan bahwa nomor tersebut diperlukan untuk urusan pekerjaan. "Nah, setelah itu si asistennya ini, yang berhijab itu, dia meminta nomor telepon saya, terus aku bilang, 'Buat apa, Kak?'. Dia bilang, 'Buat kerjaan.'"

Oke, akhirnya aku kasih nomor telepon tersebut," jelas Y.

Keesokan harinya, komunikasi di antara mereka dimulai. Awalnya hanya bertukar pesan singkat, namun kemudian mereka melakukan video call. Dalam panggilan tersebut, Ruben Onsu menawarkan Y untuk bergabung dalam tim kerjanya. "Terus akhirnya si video call-nya itu diarahin ke RO. Nah, lalu kita ngobrol-ngobrol. RO ini nanya-nanya sama saya, 'Kamu kerja apa?' katanya gitu kan. Terus aku bilang, 'Aku timnya ini, kerja sama beliau.' Terus dia bilang, 'Kamu mau enggak kerja sama saya di sini, nemenin aku?'" pungkas Y.

Dalam kesempatan tersebut, Y juga menanggapi tuduhan warganet yang menyebutnya sebagai buzzer yang bertujuan untuk merusak nama baik Ruben Onsu. Kuasa hukum Y, Christopher Anggasastra, mengungkapkan bahwa mereka sedang menyusun strategi hukum, termasuk kemungkinan untuk melaporkan balik kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. "Yang pastinya kami akan menyusun rencana sedemikian rupa demi kepentingan klien kami. Apa pun lah yang akan disangkakan pada klien kami, pasti akan kami upayakan dalam membela-nya sebaik mungkin. Untuk strategi apakah nanti mencoba untuk membuat laporan polisi atau bagaimana, masih kita pertimbangkan," ujar Christopher Anggasastra.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

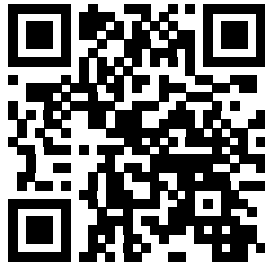
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

Karhutla Belum Tuntas, Indonesia Malah Pulangkan Pasukan Bantuan Jepang

Oleh Redaksi · 13 Okt, 14.04 WIB

(Press Release)

29 September 2026
Japan Ministry of Defense
In Japanese

- Regarding the severe forest fires causing serious damage in the Republic of Indonesia, on 28 August 2026, the Minister for Foreign Affairs consulted with the Minister of Defense about conducting international disaster relief activities. Following this consultation, the Minister of Defense ordered the Commander, Japan Self-Defense Forces Joint Operations Command, to conduct international disaster relief activities in the Republic of Indonesia.
- Following this order, Japan Ground Self-Defense Force CH-47 transport helicopters have been conducting firefighting operations on Kalimantan Island since 16 September.
- Subsequently, the Government of Indonesia informed Japan that the firefighting operations conducted by the Japan Self-Defense Forces had contributed to preventing the spread of the forest fires and that further response efforts could be handled by the Government of Indonesia. The Government of Indonesia also expressed its appreciation and gratitude for the support provided.
- In light of this, today the Ministry of Defense issued an order for the termination of international disaster relief activities in the Republic of Indonesia. Upon completion of today's planned firefighting operations, the unit will conclude its activities in Indonesia and return to Japan as soon as preparations are completed.

BANDA ACEH - Keputusan pemerintah Indonesia memulangkan pasukan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF), yang membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan memicu kontroversi.

Sebab, di lapangan terlihat jelas bahwa karhutla belum sepenuhnya padam dan kekhawatiran atas kabut asap lintas batas negara makin besar.

Publik pun mempertanyakan alasan pemerintah menghentikan bantuan dari Jepang serta sejauh mana kesiapan Indonesia menangani karhutla secara mandiri.

Polemik ini mencuat setelah Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan penghentian misi bantuan darurat pada 29 September 2026.

Padahal, operasi yang melibatkan helikopter angkut CH-47 milik JSDF tersebut baru dimulai pada 28 Agustus 2026.

Dalam keterangan resminya, pemerintah Jepang menyebut keputusan itu diambil setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia.

Jakarta dikabarkan menyampaikan bahwa bantuan pasukan

Jepang telah berkontribusi mencegah meluasnya api dan Indonesia kini mampu melanjutkan penanganan kebakaran sendiri.

Namun, alasan tersebut justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika kondisi karhutla memang sudah terkendali, bagaimana perkembangan titik api dan kualitas udara di wilayah terdampak?

Sebaliknya, jika kebakaran masih membutuhkan penanganan intensif, apa pertimbangan pemerintah mengakhiri bantuan asing?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin sensitif karena kabut asap karhutla berpotensi melintasi perbatasan dan berdampak pada negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura.

Bantuan Jepang Dihentikan, Publik Pertanyakan Kondisi di Lapangan

Kontroversi pemulangan pasukan Jepang ramai dibicarakan di media sosial X. Salah satu akun yang mempertanyakan keputusan tersebut adalah @daddyuyki.

Unggahannya menyoroti penghentian bantuan ketika penanganan kebakaran di Kalimantan dinilai belum sepenuhnya selesai.

"Kenapa Pemerintah Indonesia menghentikan bantuan dari Jepang untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan? Setelah saya check ke website Department Pertahanan Jepang ternyata, Bantuan dari Jepang yang baru setengah jalan dipaksa dihentikan atas alasan, Indonesia sanggup untuk memadamkan sisanya," tulis akun tersebut, dikutip Selasa (13/10).

Akun itu kemudian mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar sudah mampu menangani kebakaran tanpa bantuan internasional.

"Apakah benar sanggup memadamkan sendiri? atau takut terbongkar kedok dibalik kebakaran hutan? atau bagaimana? Negara Singapore dan Malaysia sudah marah besar nih?" tambahnya.

Unggahan tersebut mencerminkan kecurigaan sebagian warganet terhadap keputusan pemerintah.

Meski demikian, dugaan mengenai motif tersembunyi di balik kebakaran yang disampaikan akun itu belum disertai bukti yang dapat mengonfirmasinya.

Persoalan utama yang perlu dijawab pemerintah bukan sekadar alasan penghentian misi,

melainkan kondisi karhutla saat keputusan itu diambil dan kesiapan operasional untuk melanjutkan pemadaman setelah pasukan Jepang ditarik.

Jepang Sebut Indonesia Mampu Tangani Karhutla Sendiri

Sementara itu, secara terpisah, dokumen resmi Kementerian Pertahanan Jepang tertanggal 29 September 2026 memberikan penjelasan mengenai dasar penghentian misi tersebut.

Menurut pemerintah Jepang, Indonesia menyampaikan bahwa aktivitas JSDF telah membantu mencegah penyebaran api.

Pemerintah Indonesia juga disebut telah menyatakan mampu menangani situasi kebakaran selanjutnya secara mandiri.

"Pemerintah Indonesia telah memberitahu kami bahwa 'aktivitas Pasukan Bela Diri telah berkontribusi mencegah penyebaran api, dan oleh karena itu pemerintah Indonesia sekarang dapat menangani situasi ini sendiri'," demikian pernyataan resmi pihak Jepang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

OPINI

Kegaduhan Ijazah Gibran dan Benang Kusut Putusan MK: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Oleh Redaksi · 13 Okt, 13.39 WIB



Nopri Agustian adalah Sekretaris Jendral Koalisi Partai Pemilu dan Demokrasi/KPP DEM. FOTO/Dok. Pribadi.

Oleh: Nopri Agustian((Penulis adalah Sekretaris Jendral Koalisi Partai Pemilu dan Demokrasi/KPP DEM))

UANG publik Indonesia kembali diramaikan oleh perdebatan mengenai keabsahan ijazah pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Isu ini berkembang menjadi kegaduhan yang menyeret berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu hingga lembaga-lembaga negara.

Perdebatan yang semula berkaitan dengan proses pencalonan dan hasil Pemilihan Presiden 2024 kini melebar ke berbagai arah, seolah-olah seluruh persoalan demokrasi kita bermuara pada mereka yang menyelenggarakan pemilu.

Namun, di tengah riuhnya perdebatan tersebut, ada satu persoalan mendasar yang tampaknya luput dari perhatian sebagian masyarakat: di manakah sebenarnya pangkal dari segala polemik ini?

Jika kita hendak mengurai benang kusut persoalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, kita tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai ijazah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), ataupun penyelenggara pemilu lainnya. Kita harus menarik persoalan ini kembali ke titik awal, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah tafsir persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.

Pada Oktober 2023, MK melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun, kecuali mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Pengecualian inilah yang membuka jalan bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Putusan tersebut menjadi titik krusial dalam perjalanan menuju Pilpres 2024. Tanpa perubahan tafsir itu, Gibran yang ketika itu belum berusia 40 tahun tidak akan

memenuhi persyaratan usia berdasarkan ketentuan sebelumnya.

Dengan demikian, membicarakan polemik pencalonan Gibran tanpa membicarakan putusan MK sama halnya dengan membahas akibat tanpa menelusuri sebab.

Ketika Penjaga Konstitusi Menjadi Pusat Kontroversi

Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi, tempat masyarakat menggantungkan harapan atas tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Setiap putusannya semestinya lahir dari proses yang independen, imparial, serta terbebas dari konflik kepentingan.

Akan tetapi, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 justru menimbulkan kontroversi luas. Persoalannya tidak hanya terletak pada substansi perubahan tafsir mengenai batas usia, tetapi juga pada persoalan etik yang menyertai proses pengambilan keputusan tersebut.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), melalui pemeriksaan etik pada November 2023, menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait penanganan perkara tersebut. Putusan etik itu menjadi catatan serius bagi lembaga yang seharusnya berdiri di atas kepentingan Politik maupun hubungan personal.

Perlu ditegaskan bahwa putusan etik MKMK tidak serta-merta membatalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, fakta bahwa pelanggaran etik berat ditemukan dalam perkara yang berdampak langsung terhadap peta pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan persoalan serius yang tidak patut dikesampingkan.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Ketika lembaga yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi justru menjadi pusat kontroversi etik, kepercayaan publik terhadap proses hukum dapat terguncang.

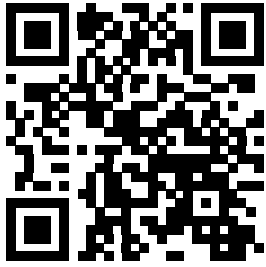
Lalu, apakah pantas apabila seluruh kemarahan publik hanya diarahkan kepada KPU dan penyelenggara pemilu lainnya?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

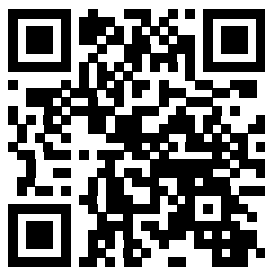
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ENERGI

Batam Blackout, 90 Persen Wilayah Terdampak

Oleh Redaksi · 13 Okt, 08.36 WIB



BANDA ACEH — Pemadaman listrik berskala luas melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sejak Senin (12/10/2026) sekitar pukul 06.30 WIB. Gangguan yang melumpuhkan aktivitas warga itu turut menghambat distribusi air bersih, mengganggu akses internet, dan memicu kemacetan akibat lampu lalu lintas yang tidak berfungsi.

Hingga Senin sore, penyebab pasti blackout belum diumumkan. Tim teknis PLN Batam masih berupaya memulihkan jaringan listrik, sementara sekitar 90 persen wilayah Batam dilaporkan terdampak pemadaman.

Gangguan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai keandalan infrastruktur dasar Batam, terutama di tengah rencana pengembangan pusat data (data center) yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan konektivitas jaringan tanpa gangguan berarti.

Manager Komunikasi dan Hubungan Masyarakat PLN Batam, Yoga Perdana Sulastama, mengatakan pihaknya masih menyelidiki sumber gangguan.

Untuk sementara, prioritas utama adalah memulihkan sistem kelistrikan dan menormalkan pasokan ke seluruh jaringan.

“Untuk penyebab gangguan kami belum tahu, untuk saat ini kami prioritaskan recovery sistem dulu, dan penormalan listrik seluruh jaringan,” kata Yoga.

Pemadaman listrik berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Warga kesulitan bekerja, menyelesaikan tugas, belajar, hingga berkomunikasi karena gangguan listrik turut menghambat akses internet.

Sejumlah warga mendatangi pusat perbelanjaan untuk mengisi daya telepon genggam dan laptop. Mal dan kafe menjadi tempat alternatif bagi mereka yang membutuhkan listrik untuk melanjutkan pekerjaan.

Situasi tersebut tergambar dalam unggahan akun @TS_Frima di media sosial X.

“Yang ada kerjaan atau tugas sampai duduk di lantai mal buka laptop, nyari colokan di tiang-tiang. Kafe penuh,” tulis akun tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan dampak pemadaman yang melampaui urusan penerangan rumah. Ketika listrik dan konektivitas terganggu secara bersamaan, pekerjaan, komunikasi, serta kegiatan ekonomi masyarakat ikut terhambat.

Gangguan listrik di Batam juga memantik kritik warganet terhadap rencana pengembangan pusat data di kawasan tersebut. Mereka mempertanyakan kesiapan infrastruktur dasar untuk menopang industri digital yang bergantung pada pasokan energi dan jaringan komunikasi yang andal.

“Pemerintah Batam nih gimana sih woi udah air mati, listrik mati blackout pula. Gitu malah ngide bikin data center,” tulis akun @EtherealYNGR.

Akun tersebut turut menyoroti potensi dampak gangguan listrik terhadap sektor-sektor yang membutuhkan layanan digital, termasuk industri, rumah sakit, dan keuangan.

Kritik serupa disampaikan akun @TJhoras yang mempertanyakan

kesiapan infrastruktur pusat data di Batam.

“Nah gmn data center, udah siap belum di Batam? Kalo masih begini mending tunda dulu dah,” tulisnya.

Pusat data merupakan fasilitas yang menampung server dan sistem jaringan untuk menyimpan, mengolah, serta mendistribusikan data digital. Fasilitas ini menopang layanan komputasi awan (cloud computing), aplikasi bisnis, hingga pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Karena beroperasi dengan kebutuhan komputasi dan pendinginan yang tinggi, pusat data memerlukan pasokan listrik yang stabil, sistem cadangan yang memadai, serta konektivitas jaringan yang andal.

Batam dinilai memiliki potensi untuk pengembangan industri tersebut karena lokasinya berdekatan dengan Singapura dan Johor, Malaysia, serta didukung infrastruktur kabel bawah laut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

OPINI

Ijazah bagi Kekuasaan

Oleh Redaksi · 13 Okt, 08.20 WIB



Oleh: Yudi Latif((Penulis adalah pemerhati politik))

I berbagai belahan dunia, demokrasi tumbuh dengan keyakinan yang berbeda tentang siapa yang berhak memimpin sebuah bangsa. Setiap negara merumuskan persyaratannya sendiri untuk memastikan bahwa kekuasaan diperoleh melalui proses yang sah. Namun, tidak semua negara menjadikan pendidikan formal sebagai syarat untuk menjadi presiden.

Di Amerika Serikat, seseorang tidak harus memiliki ijazah SMA, apalagi gelar sarjana, untuk menjadi presiden. Konstitusinya menetapkan persyaratan kewarganegaraan, usia minimum, dan masa tinggal, tanpa mencantumkan jenjang pendidikan formal.

India dan Prancis tidak menetapkan syarat minimum pendidikan formal untuk menjadi presiden. Keduanya mengatur persyaratan lain terkait kelayakan dan proses pencalonan, tetapi tidak menjadikan ijazah sebagai prasyarat hukum.

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada standar universal yang mewajibkan seorang presiden memiliki tingkat pendidikan tertentu. Ketidadaan syarat pendidikan bukan berarti pendidikan tidak penting, melainkan bahwa ijazah tidak dijadikan ukuran hukum untuk menentukan siapa yang boleh mencalonkan diri.

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pendidikan formal menjamin kecakapan seorang pemimpin, ataukah ia hanya salah satu jalan untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan kekuasaan?

Ijazah tentu memiliki arti. Ia menandai proses belajar, pengetahuan yang dipelajari, dan standar akademik yang telah dipenuhi. Pendidikan formal membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan kompleks, dan menyusun argumen secara sistematis. Dalam pemerintahan yang berhadapan dengan persoalan ekonomi, hukum, diplomasi, teknologi, dan kesejahteraan sosial, kemampuan semacam itu sangat dibutuhkan.

Namun, ijazah bukanlah cermin utuh dari manusia yang memiliki-

nya. Ia tidak selalu mencerminkan kebijaksanaan dalam menghadapi konflik, keberanian mengakui kesalahan, kepekaan terhadap penderitaan rakyat, atau kemampuan membedakan kepentingan pribadi dari kepentingan bersama. Pendidikan tinggi tidak otomatis melahirkan integritas dan kecakapan memimpin. Sebaliknya, seseorang yang tidak menempuh pendidikan tinggi mungkin memiliki pengalaman, pengetahuan praktis, dan kepekaan sosial yang tumbuh dari kehidupan.

Pendidikan formal dan kecakapan memimpin dapat saling menguatkan, tetapi keduanya tidak identik. Ijazah merupakan salah satu indikator, bukan ukuran utuh kualitas seorang pemimpin.

Lalu, Bagaimana dengan Indonesia?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat. Indonesia tidak mensyaratkan gelar sarjana, tetapi menetapkan pendidikan setingkat SMA atau sederajat sebagai batas minimum pencalonan.

Ketentuan ini menjadi penting ketika ijazah SMA wakil presiden dipersoalkan di ruang publik. Perdebatan tentang dokumen pendidikan segera membuka pertanyaan yang lebih luas: bagaimana memastikan bahwa calon pemimpin memenuhi persyaratan hukum? Dan sejauh mana pendidikan formal seharusnya menjadi ukuran kelayakan seseorang memimpin?

Kedua pertanyaan itu berkaitan, tetapi tidak sama. Yang pertama menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan keabsahan dokumen; yang kedua menyangkut gagasan tentang kepemimpinan dan kualitas orang yang dipercaya mengelola negara.

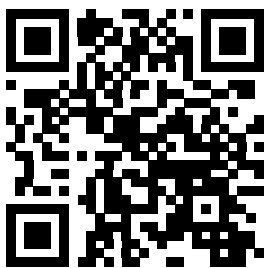
Jika undang-undang menetapkan syarat pendidikan, pemenuhannya harus diperiksa melalui prosedur yang sah, transparan, dan inklusif bagi setiap kandidat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

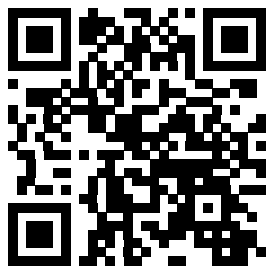
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



SPORT

Kejuaraan Panco Aceh Teuga Seri Ghozi 2026 Sukses Digelar

Oleh Redaksi · 13 Okt, 07.40 WIB



Dua atlet panco yang sedang bertanding dengan intensitas tinggi di atas meja profesional. FOTO/Reki for HAI.

BANDA ACEH - Olahraga panco kembali menggeliat di Aceh setelah puluhan tahun vakum. Kebangkitan tersebut ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Kejuaraan Panco Aceh Teuga Seri Ghozi 2026 yang berlangsung di Pas Kopi Long Raya, Minggu (11/10/2026).

Kejuaraan ini mempertemukan para pencinta olahraga panco dari sejumlah daerah di Aceh. Selain menjadi ajang adu kekuatan dan keterampilan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kembali ekosistem olahraga panco di Tanah Rencong.

Sejak pagi, arena pertandingan dipadati peserta, penonton, panitia, dan tamu undangan. Suasana semakin semarak ketika pertandingan dimulai. Para peserta saling berhadapan di atas meja panco, mengandalkan kekuatan fisik, teknik, konsentrasi, serta mental bertanding untuk mengungguli lawan.

Sorak-sorai penonton turut menghidupkan suasana di setiap pertandingan. Persaingan berlang-

sung sengit, tetapi tetap diwarnai keakraban dan semangat sportivitas antarpeserta.

Peserta dari Berbagai Daerah

Kejuaraan Panco Aceh Teuga Seri Ghozi 2026 diikuti peserta dari sejumlah daerah, antara lain Sigli, Meulaboh, Blangpidie, dan Aceh Selatan.

Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menunjukkan adanya antusiasme terhadap olahraga panco sekaligus membuka ruang pertemuan bagi komunitas yang selama ini memiliki minat serupa.

Dalam olahraga panco, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya tenaga. Teknik, posisi tangan, penguasaan gerakan, konsentrasi, dan kemampuan menjaga keseimbangan menjadi bagian penting dalam menghadapi lawan.

Di luar persaingan, para peserta juga memanfaatkan kejuaraan ini untuk membangun komunikasi, memperluas jaringan pertemanan, serta memperkuat persaudaraan sesama pencinta olahraga di Aceh.

Dihadiri Tokoh Olahraga Aceh

Kejuaraan ini turut dihadiri Drs. H. T. Rayuan Sukma, yang dikenal sebagai lifter Aceh sekaligus Ketua Umum PABSI Aceh. Ia hadir bersama Bang Pen, pelatih cabang olahraga angkat besi yang disebut pernah terlibat dalam pembinaan atlet untuk Olimpiade.

Sejumlah tokoh olahraga lainnya juga menghadiri kegiatan tersebut, termasuk Ketua KONI Kota Banda Aceh, juri nasional PBFI Aceh, Ketua POGTI Aceh, serta para tamu undangan dan perwakilan sponsor.

Pembukaan kejuaraan berlangsung secara simbolis. Ketua KONI Kota Banda Aceh turut bertindak sebagai juri dalam pertandingan pembuka yang mempertemukan Ketua POGTI Aceh dengan Wakil Ketua POGTI Aceh.

Pertandingan tersebut menjadi penanda dimulainya Kejuaraan Panco Aceh Teuga Seri Ghozi 2026.

Dalam kesempatan itu, T. Rayuan Sukma juga memberikan arahan dan motivasi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya

menghidupkan kembali olahraga panco serta mendorong perkembangan olahraga tersebut di Aceh.

Dukungan Sponsor dan Kelancaran Pelaksanaan

Penyelenggaraan kejuaraan ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, di antaranya PLN, Bank Aceh, KAI, Bulog, serta sponsor dan pihak pendukung lainnya.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyukseskan kegiatan olahraga yang mempertemukan peserta, komunitas, dan pemangku kepentingan di Aceh.

Berdasarkan keterangan penyelenggara, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan aman hingga selesai. Tidak terdapat kendala berarti selama pelaksanaan kejuaraan.

Penyelenggara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk kontribusi maupun keterlibatan langsung dalam menyukseskan acara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

IN-DEPTH

Demokrasi di Ambang Kehancuran: MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, tetapi Kekuasaan Tetap Bertahan

Oleh Redaksi · 13 Okt, 07.00 WIB



Proses persidang di Mahkamah konstitusi terkait PHPU. FOTO/MK.

DA saat ketika sebuah negara tidak sedang kehilangan demokrasi karena tidak lagi menyelenggarakan pemilu. Negara itu justru mulai kehilangan demokrasi ketika pemilu tetap berlangsung, pejabat tetap dilantik, lembaga negara tetap bekerja, dan konstitusi tetap dikutip dalam setiap pidato resmi—tetapi kepatuhan terhadap prinsip hukum tidak lagi terasa sama bagi semua orang.

Indonesia sedang menghadapi pertanyaan serius semacam itu.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menggugat persoalan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024. Dalam uraian putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas.

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Mahkamah menilai perkara tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu setelah pasangan terpilih dilantik, sementara persoalan pemenuhan syarat pencalonan berada dalam ranah kewenangan lembaga negara yang berwenang menilainya.

Di sinilah persoalan politik dan konstitusional yang mendasar muncul: apa arti persyaratan hukum jika pengadilan menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang pemenuhan persyaratan tersebut, tetapi putusannya tidak mengubah kedudukan pejabat yang dipersoalkan?

Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan slogan. Ia harus diperiksa melalui teks putusan, kronologi perkara, aturan pemilu, tanggung jawab penyelenggara negara, dan preseden yang telah membentuk perjalanan politik Indonesia sejak 2023.

Sebab, masalahnya bukan semata-mata tentang selembarnya ijazah. Masalah yang lebih besar ialah apakah hukum masih sanggup membatasi kekuasaan, atau justru berhenti pada kemampuan menjelaskan mengapa kekuasaan yang telah terbentuk sulit disentuh.

Putusan yang membuka kembali krisis kepercayaan

Dokumen utama: Putusan MK 6 Oktober 2026 dan pemberitaan Reuters serta CNA.

Dalam perkara tersebut, perbedaan antara dua pernyataan hukum sangat penting.

Pertama, MK tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat SMA atau sederajat.

Kedua, MK tidak menyatakan bahwa seluruh riwayat pendidikan Gibran tidak sah, tidak menyatakan semua dokumen pendidikannya palsu, dan tidak memutuskan bahwa setiap gelar pendidikan yang pernah diperolehnya tidak valid. Temuan mengenai tidak adanya bukti ijazah yang memenuhi persyaratan tertentu tidak boleh diperluas menjadi kesimpulan yang tidak tercantum dalam putusan.

Menurut laporan resmi MK, dokumen yang diperiksa mencakup surat keterangan penyetaraan pendidikan dan dokumen pendukung berupa keterangan kehadiran serta catatan akademik. Dalam persidangan, dokumen tersebut tidak dipandang sebagai bukti bahwa jenjang pendidikan yang dipersyaratkan telah diselesaikan.

Reuters dan Channel NewsAsia juga melaporkan substansi persoalan tersebut: pengadilan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan yang dipersyaratkan, tetapi tidak membatalkan jabatan Gibran karena perkara itu dinilai tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu yang diajukan.

Dari sudut pandang demokrasi, persoalan ini melahirkan paradoks.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia